

**ANALISIS PENGARUH KORUPSI, DEMOKRASI DAN DAYA
SAING GLOBAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI 7 NEGARA ASEAN (2014– 2019)**

(Skripsi)

Oleh

PINA KARTINA
NPM 1511021061



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KORUPSI, DEMOKRASI DAN DAN DAYA SAING GLOBAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 7 NEGARA ASEAN (2014-2019)

Oleh

PINA KARTINA

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh korupsi, demorasi dan daya saing global terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data panel untuk 7 negara ASEAN pada tahun 2014-2019. Negara yang diteliti adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos dan Kamboja. Variabel dependen yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah korupsi, demokrasi dan daya saing global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing global berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode tahun penelitian.

Kata kunci : Korupsi, Demokrasi, Daya Saing Global dan Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CORRUPTION, DEMOCRACY AND GLOBAL COMPETITIVENESS ON ECONOMIC GROWTH IN 7 ASEAN COUNTRIES (2014-2019)

By

PINA KARTINA

The purpose of this study was to examine the effect of corruption, democracy and global competitiveness on economic growth in ASEAN countries. The analytical method used in this study is the panel data analysis method for 7 ASEAN countries in 2014 until 2019. The countries studied were Indonesian, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam, Laos and Cambodia. The dependent variable used in this study is economic growth, while the independent variables used are corruption, democracy and global competitiveness. The results of this study indicate that corruption has no effect on economic growth, democracy has a negative and significant effect on economic growth and global competitiveness has a positive and significant effect on economic growth during the study year period.

Keywords : *Corruption, Democracy, Global Competitiveness and Economic Growth.*

**ANALISIS PENGARUH KORUPSI, DEMOKRASI DAN DAN DAYA
SAING GLOBAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI 7 NEGARA ASEAN (2014-2019)**

Oleh

Pina Kartina

Sripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KORUPSI, DEMOKRASI
DAN DAYA SAING GLOBAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI 7 NEGARA
ASEAN (2014-2019)**

Nama Mahasiswa : **Pina Kartina**

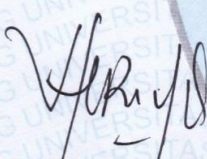
Nomor Pokok mahasiswa : **1511021061**


Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Komisi Pembimbing 1


Komisi Pembimbing 2


Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.
NIP. 19770212200604 1 001


Asih Murwiati, S.E., M.E.
NIP. 19740410200812 2 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

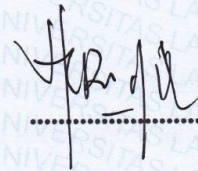

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP. 19631215198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

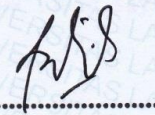
Ketua

: Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.



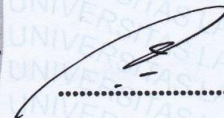
Penguji I

: Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Sc.



Penguji II

: Asih Murwiati, S.E., M.E.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2022

Penulis



PINA KARTINA

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Pina Kartina, lahir di Bakauheni, Lampung Selatan pada 11 September 1995. Penulis adalah anak ke 3 dari 4 bersauda. Penulis berdarah bugis-batak dari pasangan Abdul Kadir Cambu dan Hamidah Lubis.

Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sungai Lumpur, Cengal Kabupaten OKI-Sumatera Selatan pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009. Di tahun yang sama penulis melanjutkan studinya ke Lampung Selatan, yakni *Ushuluddin Islamic Boarding School* selama 6 bulan, dilanjutkan ke MTs. Islamiyah Ketapang dan lulus pada tahun 2012. Penulis mengawali belajar *public speaking* dan berorganisasi pada masa ini, aktif sebagai pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan dimanahkan sebagai ketua pada tahun 2011. Setelah lulus tahun 2012, penulis melanjutkan studinya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Kalianda jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2015. Selama bersekolah di Kalianda, penulis aktif sebagai pengurus Rohani Islam dan aktif juga sebagai pemain Quarto “*Sky Dream*” *Drumb Band* sekolah. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi Negara (PTN) di Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Beasiswa Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

Beasiswa Perintis Nusantara (BPN) Lampung adalah komunitas pertama yang diikuti oleh penulis ketika menjadi mahasiswa. BPN adalah beasiswa bimbingan belajar gratis persiapan menuju masuk PTN yang diselenggarakan oleh LAZIZ Al-Wasi'i Universitas Lampung. Selain beasiswa PMPAP, penulis juga mendapatkan beasiswa dari LAZIZ Al-wasi'i Universitas Lampung berupa beasiswa Mahasiswa Penghafal Al-qur'an (MPQ) pada tahun 2017-2018 dan aktif sebagai pengurus, serta beasiswa dari BI (Bank Indonesia) pada tahun 2018 serta aktif juga sebagai pengurus Generasi Baru Indonesia (GenBI). Di tahun yang sama, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pandan Surat, Kabupaten Pringsewu selama 40 hari.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi dan komunitas baik dari bidang pendidikan, kerohanian, sosial dan eksekutif kampus. Dari tahun 2015-2017 penulis aktif bergabung di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Fakultas, yakni Rohani Islam (ROIS). Penulis diamanahkan menjadi Anggota Humas pada tahun 2015, Sekertaris Badan Khusus Pemberdayaan Muslimah (BKPM) pada tahun 2016 dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua BKPM pada tahun 2017. Di tahun ini, penulis juga diamanahkan sebagai sekretaris komisi C (Kemuslimahan) Pusat Komisi Daerah (Puskomda) Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Lampung.

Pada tahun 2018 penulis mulai aktif bergabung di UKM tingkat Universitas dan daerah Lampung. Diawali dengan bergabung di Bina Rohani Mahasiswa (Birohmah) dan amanahkan menjadi Wakil Ketua Umum, sekaligus Ketua komisi C Puskomda

FSLDK Lampung. Selama periode ini, penulis pernah di tugaskan menjadi delegasi perwakilan Lampung dalam kegiatan *Training For Trainer* di Universitas Jambi pada April dan Rapat Pimpinan Nasional di Universitas Indonesia pada Juli. Berbagai macam agenda daerah dilaksanakan, seperti Gerakan Menutup Aurat (GEMAR), Hijab-Day, aksi-aksi Bela palestina, konsolidasi daerah dan kegiatan lainnya yang mencakup isu perempuan dan keumatan. Selain itu, pada akhir tahun, ketika terjadi bencana tsunami selat-sunda, penulis menjadi relawan selama 1 bulan yang dipionirkan oleh Puskomda Lampung yang bekerja sama dengan IZI Lampung.

Tahun 2019 bertepatan dengan tahun banyaknya polemik yang terjadi di Indonesia, berbagai macam isu politik hiruk-pikuk silih berganti. Di awal tahun ini, penulis dipilih menjadi Menteri Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Lampung, kemudian dilanjutkan pada Februari di Universitas Negeri Yogyakarta dalam agenda Musyawarah Nasional BEM Seluruh Indonesia (MUNAS BEM SI) penulis terpilih dan diamanahkan sebagai Koordinator Forum Perempuan (FP) BEM Seluruh Indonesia. Pada masa inilah penulis memaksimalkan perannya sebagai *social control* terkait kebijakan pemerintah, dan aktif sebagai bagian dari rakyat yang turut andil dalam berdemokrasi. Muli Lampung yang terdiri dari mahasiswa Universitas Lampung juga terbentuk dan di ketuai langsung oleh penulis pada masa ini. Forum Perempuan (FP) Lampung yang terdiri dari mahasiswa kampus daerah Lampung juga di bentuk pada tahun ini yang juga dipionirkan oleh

penulis. Sehingga pergerakan dan pemberdayaan wanita khususnya daerah Lampung dapat dimaksimalkan pada tahun ini.

Pada tingkat daerah dan nasional penulis juga aktif mengikuti kegiatan aksi mahasiswa yang berbentuk aksi tuntutan, pencerdasasan, atau kemanusiaan. Aksi yang pernah diikuti penulis adalah aksi "*Deklarasi Indonesiannya Rakyat*" di Yogyakarta, "*Indonesiannya Rakyat*", di Jakarta, "*Perempuan dan Demokrasi*" di Riau, "*Save Komisi Pemberantas Korupsi*" (KPK) di Jakarta, "*Reformasi di Korupsi*" di Jakarta, "*Kawal dari awal*" (1 hari setelah Pelantikan Presiden) di Jakarta, "*Mahasiswa Kawal Pemilu*" di Lampung, Aksi Kemanusiaan "*Tragedi Pemilu Serentak 2019*" di Jakarta, "*KARHUTLA, Indonesia Darurat Asap*" di Lampung, "*Tunda Pengesahan RUU P-KS*" di Bandung dan Lampung, "*Aksi Lampung Bergerak*", "*Kawal Pelantikan DPRD Provinsi Lampung*", "*Kartini Masa Kini*" di Lampung, "*Save Meratus*" di Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Penulis juga aktif dalam kegiatan konsolidasi nasional seperti kegiatan Lokakarya FP BEM SI di Universitas Riau di bulan Februari, Rapat Kerja Nasional BEM SI di bulan Mei di Universitas Bangka Belitung, Rapat Kerja Nasional FP BEM SI di bulan Juni di Universitas Padjajaran, Konsolidasi Nasional di Universitas Lampung Mangkurat di bulan Oktober, dan terakhir pada akhir bulan penulis melaporkan pertanggungjawabannya dalam kegiatan MUNAS BEM SI di bulan Desember bertepatan di Universitas Mataram. Lalu, pada tahun 2020 penulis fokus pada kegiatan sosial, penulis juga dimanahkan sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Madrasah Relawan Lampung yang berada di bawah naungan LAZNAZ Dewan Dakwah Lampung.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah. Ucapan syukurpun tak cukup menyeimbangi betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh-Nya. Allah yang maha baik, yang menciptakan diri ini sebagai Pina Kartina. Betapa luas kasih sayang dan ampunan-Nya.

Ku persembahkan karya sederhana ku ini pertama yang paling utama adalah untuk Rabb ku. Tuhan semesta Alam, Allah SWT. Karena-Nya lah diri ini bisa kuliah di Universitas Lampung, karena-Nya lah diri ini bisa menebar manfaat dan karena-Nya lah skripsi ini bisa terselesaikan. Alhamdulillah.

Ku persembahkan juga karya sederhana ku ini kepada :

Ayah, Emak, Alm. Uwa' Regar, Uwa' Siah, Ibu Anis, Uda' Agus, Tulang Zul, Ibu Piah. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan dan kepercayaan yang senantiasa diberikan. I LOVE YOU, Lubis Family.

Kakak dan adikku tersayang, Kak Desi, Kak Cek, Kak Sundari, Dek Asna, Bang Ratno, Kak Ani, Kak Diana, Kak Yanti, Kak Marya, Kak Yuni, Nurul, keluarga besar opung Lubis, keluarga besar Cambu, sahabat, teman seperjuangan di organisasi. Terimakasih. I Love You.

The Best Teacher, Bu Hero, Pak Iwan Brades, Pak Norman, Pak Tasmir, Pak Rohani, Pak Edi, Alm. Pak Saibul, Alm. Pak Irwan, Pak Fathur, Bu Sudarti, Pak Musripin, Bu Feni, Bu Reni, Kak Indra Budisetiawan, Pak Heru, Bu Asih, Mr. Andi, Kak MS serta dosen-dosen EP FEB UNILA.

Terimakasih telah membuat ku jatuh cinta pada ilmu.

MOTTO

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.

(Q.S. Ar-Rad : 28)

....Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara mu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.....

(Q.S. Al-Mujadalah : 11)

Man Jadda Wa Jada.

Sukses adalah milik mereka yang memiliki Tekad yang kuat, Ketekunan yang konsisten, Ruhiah yang terjaga serta Ridha Orang Tua.

Make your parents happy, than god will make you happy.

Happy with the happiness of others.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran, kasih sayang serta kenikmatan yang tidak terhitung dengan hitungan dan tidak terbilang dengan bilangan yang senantiasa diberikan oleh-Nya, Allah SWT. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Korupsi, Demokrasi dan Daya Saing Global terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 7 negara ASEAN (2014-2019) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Tentunya dalam penulisan ini penulis sangat sadar akan kekurangan yang dimiliki, sehingga tidak akan berjalan baik tanpa adanya *support and motivation* dari berbagai pihak. Untuk itu dengan ketulusan dan dalam kenangan yang indah penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S. E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi. Terimakasih telah menjadi sosok yang sabar dan menginspirasi untuk semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dan ikhlas untuk berbuat kebaikan. Terimakasih telah menjadi panutan dan *Role Model* yang baik. Barokallah bapak. Semoga senantiasa istiqomah dan selalu diberikan keberkahan.
4. Ibu Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing skripsi 2. Terimakasih telah menjadi guru dan ibu yang baik serta sabar membimbing

menulis skripsi, terimakasih selalu berada di ruangan bu, sehingga sangat mudah bagi saya untuk mendapatkan bimbingan dari ibu. Semoga Allah memberkahi waktu ibu ☺.

5. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.Si dan ibu Tiara Nirmala, S.E., M.si. selaku dosen pembahas yang bersedia meluangkan waktunya bahkan di waktu-waktu yang tak terkira. Terimakasih atas saran dan masukannya sehingga skripsi saya bisa menjadi lebih baik. Semoga Allah memberkahi waktu ibu.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Prof. SSp. Pandjaitan, Pak Ambya, Pak Yudha, Pak Imam, Bu Marsel, Bu Betty, Bu Emi, Pak Yoke, Pak Thomas, Pak Toto, Pak Husaini, Alm. Pak Saimul, Pak Afri, Bu Irma, Pak Muhiddin, Ibu Lies, Ibu Ida, Pak Moneyzar, Pak Pigo, Pak Ribhan, Pak Arifin, Bu Reni, Bu Neni dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak dapat di tuliskan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu disini.
7. Mba Diah, Bu Wiwit, Ibu yati dan Mba Mimi serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terimakasih atas bantuan yang selama ini diberikan.
8. *The Best Men*, “Mas Tri” sebagai *supporting system* agenda Rohani Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung selama periode kepengurusan. Mas Tri yang baik hati dan ramah, semoga selalu dalam lindungan-Nya.
9. Ayah ku tercinta, Abdul Kadir Cambu dan Emak ku Tercinta, Hamidah Lubis. Terimakasih atas doa dan dukungan serta kepercayaan yang kalian berikan kepada anak mu ini. Terimakasih telah membuat ku menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri.
10. Kakak tersayang ku, Desi Karmila. Kakak “TERSABAR”. Terimakasih telah menyekolahkan ku dan mensupport ku untuk menggapai cita-cita. Kak Cek, kakak ter-humble dan termanis, kak Sundari, “*Strong Mother*” dan Adik ku Asna yang tak suka bergosip :p.
11. Keluarga besar Opung Lubis dan keluarga besar Cambu. Terimakasih telah menjadi tempat ter-nyaman untuk kembali pulang dan bercerita.

12. Tulang Godang, terimakasih telah menjadi panutan kehidupan. Terimakasih Laptopnya Tulang.
13. Bu Anis. Terimakasih ibu atas bantuan yang banyak sekali ibu berikan, bantuan moral, motivasi, materi, dll. I Love You Full Bu.
14. Alm. Uwa Regar dan Uwa Siah. Terimakasih uwa, sudah menyekolahkan dan mendidik diri ini sehingga bisa menjadi Pina yang mandiri dan bertanggungjawab. Jasa mu kan selalu ku kenang. I LOVE YOU uwa.
15. Guru-guru ku, guru SD, MTs dan SMK yang telah membuat Pina semangat untuk menuntut Ilmu. Terimakasih guru ku. Jasa mu-kan ku kenang.
16. Sahabat Ganinda : Mely, Murnia, Esti, Alm. Masroji, Joko, Agung, Wawan, Fahri, Ryan, Irvan. Terimakasih telah menjadi sahabat yang senantiasa saling *support* meski jarak dan waktu memisahkan kita.
17. Sahabat Sekupat : Mbul, Wahyu, Ipeh, Tri, Ntul. Terimakasih telah berjuang bersama untuk meraih asa.
18. Mujaer Crew : Tete Riski, Atu' Rova, Kak Salma, Kak Dini, Mba Dinati, Zulaikah, Lulu', dek Fitria, Desi. Terimakasih, kontrakan yang di penuh manusia-manusia yang semangat menebar manfaaat dan memaksimalkan ketaatan bersama-sama.
19. Vilmut Team : Riski, Azizah, Mba Citra dan Aul. Terimakasih telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan ini.
20. Kontrakan Sister Lillah : Eka, Ajeng, Alif, Fitri, Shofi dan Erna. Terimakasih telah menjadi tempat yang nyaman untuk kembali pulang ke Bandar Lampung. Terimakasih telah menjadi saksi detik-detik akhir perjuangan.
21. Beasiswa Perintis Nusantara 3 Lampung : Dhanti, Fitri, Kiki, Mely, Titin, Tifa, Atun, Desriza, Riski, Tiara May, Ulfa, Antika, Tiara, Tiari, Titi, Delis, Teresa, Nadia, Nadin, Novi, Moli, Widi, Ardhi, Yoga, Wahyudi, Tofik, Kusma, Mba Indah, Kak Megi, dan Pak Subiyan. Terimakasih, karena pancaran cahaya kebaikan dan akhlak serta ilmu pengetahuan kalian berhasil membuat diri ini hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
22. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan 2015.

23. Rois FEB Unila 2017, Birohmah Universitas Lampung 2018 dan Puskomda Lampung 2017-2018. Terimakasih atas perjuangan LILLA AH saat bersama. Terimakasih atas pengorbanan dan solidnya kalian.
24. KKN Pandan Surat : Pipi, Bang Sholih, Fedrad, Reksi, Voni dan Bang Rega. Terimakasih atas kebersaannya, canda-tawa dan semangat pengabdianya.
25. Umi Maysitoh dan Ustad Hasan, Khadijah, Mba Elya, Mba Ishmah, Ribut, Dila, Hana dan teman-teman perjuangan MPQ Unila 2017-2018. Terimakasih telah menyejukkan hati ini. Terimakasih atas nasihatnya dan motivasi kehidupan dunia dan akhiratnya.
26. Teman-teman pergerakan BEM Unila 2019, PPW, Barisan Sri Kandi Lampung, Muli Lampung, Forum Perempuan Lampung, Pengurus Inti BEM SI 2019, FP BEM SI 2019, Pecinta Berkuda. Terimakasih telah mengukirkan sejarah perjuangan kampus dan Indonesia. Terimakasih telah mengajarkan diri ini tuk bisa menjadi pribadi yang tangguh dan beridealisme. “Terbentur, terbentur dan terbentuk”, disinilah tempat terbentuknya karakter baru diri ini.
27. Madrasah Relawan Lampung, LAZNAZ Dewan Dakwah Lampung dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lampung. Terimakasih telah menjadi tempat belajar bersosialisai, terimakasih telah menyadarkan diri ini tentang makna syukur.
28. Dewan Guru SMP IT Wahdatul Ummah Metro. Terimakasih telah menjadi tempat belajar diri ini untuk senantiasa memahami orang lain, tuk semangat memperbaiki diri dan tuk semangat menambah ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Saran dan Kritik sangat diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 01 Oktober 2022

Pina Kartina

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	13
1.3.Tujuan Penelitian	14
1.4.Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teoritis	16
2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perekonomian.....	16
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.2.2. Teori Pertumbuhan	18
2.1.3 Korupsi	19
2.1.3.1. Pengertian Korupsi	19
2.1.3.2. Bentuk Korupsi.....	20
2.1.3.3. Pelaku Korupsi	21
2.1.3.4. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi	23
2.1.4 Demokrasi.....	23
2.1.4.1. Pengertian dan Teori Demokrasi	23
2.1.4.2. Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	26
2.1.4.3. Demokrasi, Sistem Ekonomi dan Sistem Pemerintah.....	27
2.1.5 Daya Saing Global	29
2.1.5.1. Pengertian Daya Saing Global	29
2.1.5.2. Tujuan, Sasaran dan Kegunaan Daya Saing Global.....	30
2.1.5.3. Konsep Daya Saing Global	31
2.1.5.4. Daya Saing Global dan Pertumbuhan Ekonomi.	32
2.2. Tinjauan Empiris	32
2.3. Kerangka Pemikiran	38
2.4. Hipotesis	40

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2. Definisi Operasional Variabel	42
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	42
3.2.2. Korupsi	42
3.2.3. Demokrasi.....	43
3.2.4. Daya Saing Global	44
3.3. Metode Analisis	45
3.3.1. Regresi Data Panel	45
3.4. Prosedur Analisis Data	46
3.4.1. Metode Estimasi Regresi Data Panel	46
3.4.1.1. Metode <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	47
3.4.1.2. Metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	47
3.4.1.3. Metode <i>Random Effect Model</i> (REM).....	47
3.4.2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel.....	49
3.4.2.1. Uji Chow.....	49
3.4.2.2. Uji Hausman.....	49
3.4.2.3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	50
3.4.3. Pengujian Asumsi Klasik	51
3.4.3.1. Uji Normalitas.....	51
3.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas.....	52
3.4.3.3. Uji Multikolinieritas.....	53
3.4.3.4. Uji Autokorelasi.....	53
3.4.4. Pengujian Hipotesis.....	54
3.4.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)	54
3.4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	56
3.5. Koefisien Determinasi (R^2).....	56

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif	57
4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	57
4.1.2. Korupsi	58
4.1.3. Demokrasi.....	58
4.1.4. Daya Saing Global	59
4.2. Pengujian Asumsi Klasik.....	59
4.2.1. Uji Normalitas.....	59
4.2.2. Uji Heteroskedastisitas	63
4.2.3. Uji Multikolinieritas	64
4.2.4. Uji Autokorelasi.....	65
4.3. Hasil Regresi Model Data Panel	66
4.3.1. Uji Kriteria Pemilihan Model	66
4.3.1.1. Uji Chow	67
4.3.1.2. Uji Hausman.....	67
4.3.2. Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel.....	68
4.3.3. Pengujian Hipotesis.....	69
4.3.3.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	69
4.3.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-Statistik)	71
4.3.4. Koefisien Determinasi (R^2)	71

4.4.Pembahasan Penelitian	71
4.4.1.Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 7 Negara ASEAN	72
4.4.2.Pengaruh Demokrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 7 Negara ASEAN	74
4.4.3.Pengaruh Daya Saing Global terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 7 Negara ASEAN.....	77
4.5.Analisis <i>Individual Effect</i> di 7 Negara ASEAN.....	79

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN 2014-2019 (dalam persen)	3
2. Korupsi ASEAN 2014-2019 (dalam indeks).....	5
3. Demokrasi ASEAN 2014-2019 (dalam indeks)	8
4. Daya Saing Global ASEAN 2014-2019 (dalam indeks).....	12
5. Pilar Indeks Daya Saing Global.....	31
6. Tinjauan Empiris.....	33
7. Ringkasan Variabel Penelitian	42
8. Klasifikasi Demokrasi.....	44
9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	57
10. Hasil Deteksi Heteroskedastisitas (Gletser)	63
11. Hasil Deteksi Multikolinearitas Metode Korelasi Berpasangan	64
12. Uji Multikolinieritas dengan VIF.....	65
13. Hasil Uji Chow	67
14. Hasil Uji Hausman.....	68
15. Hasil Regresi Model FEM.....	68
16. Hasil Uji t-statistik Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	70
17. Hasil Uji F	71
18. Nilai Koefisien <i>Individual Effect</i> di 7 negara ASEAN	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerangka Pemikiran	40
2. Uji Normalitas pada 8 Negara ASEAN (beserta Singapura)	60
3. Uji Normalitas pada 8 Negara ASEAN Log Variabel Dependen dan Independen.....	61
4. Uji Normalitas pada 8 Negara ASEAN Log Variabel Independen.....	62
5. Uji Normalitas pada 7 Negara ASEAN.....	62
6. Ketentuan katagori Autokorelasi pada Metode <i>Durbin-Watson</i>	66
7. Rata-rata Korupsi dan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi.....	72
8. Rata-rata Demokrasi dan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi.....	75
9. Rata-rata Daya Saing Global dan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi.....	78

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pemerintah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara merupakan faktor penting untuk menunjang proses pembangunan. Sebuah negara yang memiliki sistem peradilan yang baik, pegawai pemerintahan yang jujur dan perundang-undangan yang jelas dan kuat akan mengalami standar hidup perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang sistem peradilannya lemah, pemerintahannya korup dan sering terjadi revolusi atau kudeta (Mankiw et al., 2012). Pemerintah merupakan pemimpin dari masyarakat dalam suatu negaranya. Adam Smith menyatakan memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta adalah fungsi pemerintah (dalam Sumarni, 2013). Jika peran pemerintah maksimal dilakukan, maka negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya bersama warganya untuk mencapai tujuan bersama yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Brudeseth (2015) dalam jurnal (Maulidia & Yulistiyono, 2020) menyatakan bahwa kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup yaitu kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap Negara termasuk bagi ASEAN.

Pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami penambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro (1997) pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan (dalam Hasan & Aziz, 2018). Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi penting atau sesuatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Machmud, 2016). Hal ini membuktikan bahwa peran pemerintah untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi dalam negara adalah suatu keharusan.

Fokus Penelitian ini adalah mencakup kawasan negara-negara ASEAN. Deklarasi ASEAN menyatakan maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Kerjasama Ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama-kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan dan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN (Sinambela & Ardiyanti, 2020). Baik secara langsung ataupun tidak langsung, antar negara ASEAN kondisi negaranya saling mempengaruhi.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN 2014 – 2019 (dalam Persen)

Negara	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	5,01	4,87	5,03	5,06	5,17	5,01
Malaysia	6,01	5,09	4,44	5,81	4,76	4,30
Singapura	3,94	2,98	3,32	4,52	3,49	1,34
Thailand	0,98	3,13	3,43	4,17	4,18	2,26
Filipina	6,35	6,34	7,14	6,93	6,34	6,11
Vietnam	5,98	6,67	6,21	6,81	7,07	7,01
Laos	7,61	7,27	7,02	6,89	6,24	5,45
Kamboja	7,14	7,11	6,93	6,84	7,46	7,05

Sumber : *Word Bank* 2020, (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang ber-beda. Laos memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode penelitian, yaitu sebesar 7,61% di tahun 2014. Pada tahun yang sama, Thailand adalah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu sebesar 0,98%. Hal ini juga merupakan pertumbuhan ekonomi terendah selama periode penelitian.

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil, yaitu berada pada angka 5%, kecuali pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun, menjadi 4%, namun setelah itu stabil kembali menjadi 5%. Negara yang bertetangga dengan Indonesia, yaitu Malaysia memiliki pertumbuhan ekonomi dengan rentang 4-6%, namun laju pertumbuhan ekonomi Malaysia cenderung menurun selama periode penelitian, kecuali pada tahun 2017 naik sebesar 1,37% dari tahun sebelumnya.

Singapura memiliki rentang angka pertumbuhan ekonomi 1-4% Pertumbuhan ekonomi Singapura terbilang tidak cukup stabil, karena mengalami fluktuasi (naik-turun). Serupa dengan Singapura, Thailand memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, bahkan pertumbuhan ekonomi Thailand berada dibawah 1%. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi Thailand cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali pada akhir tahun, turun sebesar 1,92% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Filipina didominasi pada angka 6%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia Singapura dan

Thailand. Bahkan Filipina memperoleh angka 7,14% pada tahun 2016. Namun pertumbuhan ekonomi Filipina selalu mengalami penurunan meskipun tidak signifikan, kecuali pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Filipina naik sebesar 0,8% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam, Laos dan Kamboja adalah pertumbuhan ekonomi yang memiliki angka yang lebih besar daripada penjelasan negara sebelumnya. Kamboja adalah negara yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi antar negara ASEAN, yaitu sebesar 7,09%. Hal ini di dukung oleh rentang angka pertumbuhan ekonomi Kamboja lebih tinggi dari pada negara ASEAN lainnya yaitu sebesar 6-7%.

Laos dan Vietnam memiliki rentang nilai pertumbuhan ekonomi yang sama, yaitu sebesar 5-7%. Laos memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,75%, sedangkan Vietnam 6,6%. Kamboja dan Vietnam memiliki siklus pertumbuhan ekonomi yang hampir sama, mengalami fluktuasi naik-turunnya angka setiap tahunnya. Sedangkan Laos meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang terbilang cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi Laos terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Deskripsi pertumbuhan ekonomi diatas menunjukkan bahwa setiap negara memiliki angka pertumbuhan yang berbeda-beda, bahkan dalam satu negara sekalipun mengalami fluktuasi angka pertumbuhan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, beberapa di antaranya adalah investasi, teknologi, tenaga kerja, pendidikan dan modal. Selain itu berbagai sumber penelitian menyebutkan bahwa korupsi berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Fajar & Azhar (2018) mengatakan bahwa secara parsial indeks persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN (penelitian 2000-2017). Artinya korupsi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini di dukung oleh para ekonom yang memandang korupsi adalah satu satu sebab merosotnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin buruk pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Semenjak tahun 1995 Transparansi Internasional (TI) telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahunnya yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Sumber data yang digunakan untuk menyusun IPK terdiri secara khusus mencakup manifestasi korupsi sektor publik yaitu penyuapan, pengalihan dana publik, pejabat menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi (tanpa menghadapi konsekuensi), kemampuan pemerintah untuk membendung korupsi di sektor publik, birokrasi berlebihan di sektor publik (dapat meningkatkan peluang korupsi), nepotisme pegawai negeri, undang-undang (tentang ungkapan keuangan dan potensi konflik kepentingan), perlindungan hukum bagi orang yang melaporkan kasus suap dan korupsi, penangkapan negara dan akses ke informasi tentang urusan publik/kegiatan pemerintah.

IPK memiliki skor nilai 0-100, dimana ketika IPK mendekati angka 100 dalam suatu negara maka semakin sedikit juga tindak korupsi dalam negara tersebut. Ketika IPK semakin mendekati angka 0 dalam suatu negara, maka semakin tinggi juga tindak korupsi dalam suatu negara tersebut.

Tabel 2. Korupsi ASEAN 2014-2019 (dalam Indeks)

Negara	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	34	36	37	37	38	40
Malaysia	52	50	49	47	47	53
Singapura	84	84	85	84	84	85
Thailand	38	38	35	37	36	36
Filipina	38	35	35	34	36	34
Vietnam	31	31	33	35	33	37
Laos	25	25	30	29	29	29
Kamboja	21	21	21	21	20	20

Sumber : *Transparency International*, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan Singapura adalah negara yang memiliki IPK tertinggi se ASEAN selama periode penelitian, konsisten pada skor 84 dan 85. Bahkan Singapura adalah negara yang selalu mendapat peringkat 7 besar dunia selama periode penelitian, puncaknya Singapura meraih ranking 3 dunia pada tahun 2018. IPK Singapura tinggi dikarenakan memiliki institusi yang kuat, supremasi

hukum dan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi (TI, 2019). Sedangkan untuk IPK yang memiliki skor tertinggi setelah Singapura adalah Malaysia yang memiliki skor IPK berskala 40-50.

Thailand, Filipina, Vietnam dan Laos memiliki IPK yang berada pada skala skor 20-30. Sedangkan IPK terendah se-ASEAN selama periode penelitian di peroleh oleh Kamboja, konsisten pada skor 20 dan 21. Artinya banyak pejabat publik yang melakukan korupsi di dalam negara ini. Mengacu pada data yang dirilis oleh *Transparency International* (TI), Kamboja mendapatkan peringkat 162 dunia pada tahun 2019. Faktor rendahnya IPK di negara ini adalah Kamboja tidak memiliki infrastruktur kelembagaan dasar, seperti mekanisme administrasi dan supremasi hukum dalam menunjang sistem yang berintegritas, selain itu penindasan warga yang berbicara menentang korupsi juga merupakan faktor tingginya tingkat korupsi dinegara ini (TI, 2022). Dapat disimpulkan, peran pemerintah serta peran masyarakat untuk mengatasi permasalahan korupsi menentukan nilai IPK dalam suatu negara.

Dari sisi pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi terdapat banyak perbedaan hasil dari peneliti. Sebagian para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan. Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dapat mengurangi anggaran negara yang akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan negara untuk mereduksi korupsi dan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama jaminan dibidang sosial dan pembayaran kesejahteraan publik (Fajar & Azhar, 2018). Penelitian ini menyimpulkan korupsi berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi & Putra (2020) dengan menggunakan metode analisis studi literatur dengan objek 15 penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada kebebasan ekonomi, jika kebebasan ekonomi memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi maka IPK berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, jika kebebasan ekonomi memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang rendah maka IPK berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kata

lain korupsi berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi jika kebebasan ekonomi tinggi dalam suatu negara. Jika kebebasan ekonomi memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang rendah, maka pengaruh korupsi berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Kebebasan ekonomi adalah sebuah kerangka dimana prinsip-prinsip yang kompatibel dengan cita-cita kemakmuran terimplementasikan dalam kelembagaan dan proses ekonomi. Semangat kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan pribadinya, saling memberikan manfaat dan kontribusi untuk mencapai kesejahteraan adalah prinsip dari kebebasan ekonomi (indeks, 2020). Hal inilah yang mendasari pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi akan turun jika kebebasan ekonomi dalam suatu negara tinggi.

Jika dilihat perbandingan antara pertumbuhan ekonomi (tabel 1.) dan IPK (tabel 2.) Singapura dan Kamboja terjadi ketidakselarasan. Kamboja memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi memiliki skor IPK yang rendah (korupsi tinggi), begitupun Singapura yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah namun memiliki IPK yang tinggi (korupsi rendah). Diduga pengaruh perbedaan hasil ini adalah tergantung bagaimana implementasi kebebasan ekonomi di masing-masing negara sebagaimana hasil penelitian Haqiqi dan Putra (2020).

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sebagian besar ekonom setuju tingkat pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah 2% dan 3% (Amadeo, 2022). Hal ini dapat menjelaskan perbedaan hasil IPK dan pertumbuhan ekonomi dalam periode penelitian, terutama dalam kasus Kamboja dan Singapura.

Selain Korupsi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nairobi et al. (2021), Demokrasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Indonesia, hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan demokrasi maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan

dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup rakyat dan negara dalam suatu negara.

Doucouliajos & Ulubasoglu (2006) juga melakukan penelitian pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan 81 studi literatur yang telah di terbitkan dengan menggunakan pengujian metode Meta-Analisis. Kesimpulannya adalah tiga perempat dari regresi belum dapat menemukan tanda positif dan signifikan yang “diinginkan”. Hasil penelitian ini juga membuktikan setengah dari model regresi menemukan perkiraan yang signifikan dan sisanya tidak signifikan. Artinya, terdapat banyak sekali perbedaan hasil penelitian pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi dari penelitian-penelitian terdahulu.

Untuk menghitung nilai demokrasi, sejak tahun 1946 *Economist Intelgence Unit* (EIU) menerbitkan skor indeks yang disebut dengan indeks demokrasi. EIU adalah sebuah divisi penelitian dan analisis *The Economic Group*, saudara perusahaan dari *The Economist* yang berfungsi untuk membantu bisnis, perusahaan keuangan, dan pemerintah untuk menavigasi lanskap global yang terus berubah.

EIU mengajukan 5 pertanyaan kepada negara yang di teliti untuk memperoleh indeks demokrasi, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik dan dan budaya politik. Skala indeks demokrasi adalah 0-10. Dimana jika semakin tinggi indeks, maka semakin tinggi pula demokrasi dalam suatu negara tersebut. Terdapat klasifikasi demokrasi yang ditentukan oleh skor indeks, dimulai dari rezim otoritarian dengan indeks 0-4, rezim hibrida 4,01-6, demokrasi tidak sempurna 6,01-8 dan demokrasi penuh dengan rentang 8,01-10.

Tabel 3. Demokrasi ASEAN tahun 2014-2019 (dalam Indeks)

Negara	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	6,95	7,03	6,97	6,39	6,39	6,48
Singapura	6,03	6,14	6,38	6,32	6,38	6,02
Malaysia	6,49	6,43	6,54	6,54	6,88	7,16
Thailand	5,39	5,09	4,92	4,63	4,63	6,32

Filipina	6,77	6,84	6,94	6,71	6,71	6,64
Vietnam	3,41	3,53	3,38	3,08	3,08	3,08
Laos	2,21	2,21	2,37	2,37	2,37	2,14
Kamboja	4,78	4,27	4,27	3,63	3,59	3,53

Sumber : *Economist Intelligence Unit*, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa negara ASEAN memiliki indeks demokrasi yang berbeda-beda. Tidak ada satupun negara ASEAN yang terkatagori demokrasi penuh karena nilai indeks demokrasi semua negara ASEAN dibawah 8,01. Demokrasi penuh adalah kondisi dimana kebebasan politik dan sipil di hormati serta diperkuat oleh budaya politik yang kondusif. Maksimalnya transparansi dari pemerintah, pemerintah berfungsi dengan baik serta banyak media massa yang independen juga merupakan ciri dari demokrasi penuh (EIU, 2020).

Indonesia, Singapura, Malaysia dan Filipina adalah negara yang terkatagori demokrasi tidak sempurna selama periode penelitian. Demokrasi tidak sempurna adalah dimana pemilu masih berlangsung secara adil dan bebas serta kebebasan sipil masih dihormati, namun terdapat masalah yaitu pelanggaran terhadap kebebasan pers dan sedikit membatasi gerak para oposisi serta memiliki cukup banyak masalah dalam fungsi pemerintah (EIU, 2020). Seperti dalam halnya Indonesia, Singapura dan Filipina yang memiliki bentuk pemerintahan yang sama (republik dan presiden sebagai kepala negara, kecuali singapura kepala negara dibantu oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan) kebebasan berekspresi memang sudah tertera di konstitusi di negara ini. Namun dalam implementasinya untuk menyuarakan pendapat masih terbilang susah (Mulia, 2018). Padahal kebebasan berpendapat bagian dari *social control* dari masyarakat terhadap kebijakan dalam suatu negara. Suara masyarakat dalam suatu negara perlu di pertimbangkan oleh pemerintah, untuk kemajuan, pertumbuhan, pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Malaysia yang memiliki bentuk pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh raja bergelar yang dipertuan agong (Marisha, 2020) tentu sulit memperoleh katagori demokrasi sempurna. Hal ini dikarenakan Malaysia memiliki bentuk negara federal dan negara bagian yang menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi, dimana

yang dipertuan agong memiliki banyak wewenang pengambilan kebijakan didalam negaranya, seperti memiliki kekuasaan dibidang eksekutif dan Yudikatif. Atas dasar inilah ke 4 negara ini memperoleh katagori demokrasi tidak sempurna.

Dari tahun 2014-2018, Thailand terkatagori rezim hibrida. Rezim Hibrida adalah kondisi dalam suatu negara yang terdapat tindak kecurangan dalam pemilu reguler serta keberadaan negara sedikit menghalangi rakyatnya untuk mendapatkan demokrasi yang adil dan bebas. Pemerintah yang memberikan tekanan kepada oposisi politik, peradilan yang tidak independen, korupsi merajalela, pelanggaran kebebasan pers dan supremasi hukum yang lemah juga merupakan karakteristik dari rezim ini (EIU, 2020). Pada tahun 2019 status demokrasi Thailand berubah menjadi demokrasi tidak sempurna kerana memperoleh indeks 6,32. Hal ini dikarenakan Thailand berhasil melakukan pemilihan umum pada Maret 2019, sehingga negara dapat mengembalikan kepercayaan publik pada sistem politik setelah kudeta militer pada Mei 2014 (Lidwina, 2020). Inilah yang menyebabkan indeks demokrasi Thailand meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Vietnam dan Laos adalah dua negara yang memiliki indeks demokrasi yang rendah, sehingga 2 negara ini terkatagori rezim otoritarian. Sedangkan Kamboja pernah terkatagori rezim hibrida pada tahun 2014-2016, namun indeks demokrasi Kamboja turun pada tahun 2014-2017 sehingga mendapat predikat rezim otoritarian. Rezim Otoritarian adalah kondisi negara yang dimana pluralisme politik tidak ada ataupun keberadaannya sangat terbatas (EIU, 2020). Negara-negara ini sangat kental dengan ideologi komunisme dan bentuk pemerintahan yang monarki, sehingga membuat negara-negara tersebut mendapatkan angka indeks yang rendah dalam konteks demokrasi. Laos dan Vietnam merupakan negara yang hanya mengakui satu partai politik. Sedangkan di Kamboja, bentuk pemerintahannya masih bersifat monarki konstitusional, dengan kondisi domestik yang masih menganut ideologi komunisme dan atau memiliki bentuk pemerintahan yang monarki (Mulia, 2018). Meskipun negara ini memiliki indeks demokrasi yang rendah, Kamboja, Vietnam dan Laos tetap di teliti dikarenakan untuk melihat secara menyeluruh pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

Kesimpulannya adalah demokrasi negara ASEAN dipengaruhi oleh sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana implementasi kinerja pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam suatu negara. Terdapat korelasi antara peran pemerintah, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Seperti contoh kasus, Laos adalah negara yang memiliki indeks demokrasi terendah se ASEAN selama periode penelitian. Namun hal ini tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi ASEAN terbilang cukup tinggi yang memperoleh ranking 2 dari rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi ASEAN, begitupun dengan negara ASEAN lainnya. Artinya, disimpulkan sementara demokrasi berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras dengan Huntington (1968) yang beragumen bahwa demokrasi memiliki institusi politik yang lemah dan rapuh. Pemerintah demokratis rentan terhadap tuntutan redistribusi ke kelompok berpenghasilan rendah. Rezim non-demokratis dapat menerapkan secara paksa kebijakan ekonomi kaku yang diperlukan untuk pertumbuhan, dan menekankan tuntutan penghambat pertumbuhan pendapatan rendah (Doucouliagos & Ulubasoglu, 2006). Di duga, ketika demokrasi tinggi dalam suatu negara bisa dikatakan terjadi banyaknya keresahan dan ketidakpuasan rakyat yang menuntut keadilan dan kesejahteraan kepada pemerintah. Namun, demokrasi juga penting karena sebagai upaya pemaksimalan peran masyarakat sebagai *sosial control* pemerintah. Hal inilah yang menjadi dasar alasan penelitian pada variabel demokrasi.

Selain korupsi dan demokrasi, banyak pendapat dari penelitian terdahulu yang menghasilkan daya saing global berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan secara signifikan dan positif. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Rajagukguk (2018), Dadgar et al. (2018) dan Nababan (2019). *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Program on Technology and the Economy 1992* mendefinisikan bahwa daya saing suatu negara didasarkan pada produktivitas yang lebih baik (Nababan, 2018). Menurut Nababan, daya saing berkaitan dengan peningkatan taraf hidup, pengembangan kesempatan kerja, dan kemampuan suatu bangsa untuk memenuhi kewajiban internasionalnya. Kaitan inilah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Sedangkan *World Economic Forum (WEF)* mendefinisikan daya saing negara adalah

kemampuan ekonomi nasional untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam menentukan nilai daya saing global (DSG), *World Economic Forum (WEF)* menerbitkan laporan berupa indeks daya saing global (IDSG) setiap tahun dengan tujuan menilai kapasitas ekonomi dunia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Pusat Kajian Anggaran Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Indeks daya saing global adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Kerangka pembentuk nilai IDGS terdiri dari 4 aspek, yaitu lingkungan yang mendukung/kondusif, modal manusia, aspek pasar dan ekosistem inovasi. Keempat aspek ini kemudian dirinci kembali menjadi 12 pilar, terdiri dari institusi, infrastruktur, adopti TIK, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran ekonomi, dinamika bisnis dan kemampuan inovasi. IDSG berskala 0-100, dimana jika semakin tinggi angka maka semakin besar pula kemampuan negara dalam mengolah fakto-faktor produktivitasnya.

Tabel 4. Daya Saing Global ASEAN 2014-2019 (dalam Indeks)

Negara	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	64,72	65,30	64,60	66,86	64,63	64,63
Malaysia	71,85	73,70	74,65	73,86	74,38	74,60
Singapura	80,19	80,65	81,10	81,57	83,48	84,78
Thailand	64,90	66,52	66,32	67,43	67,53	68,11
Filipina	61,22	62,84	62,72	62,14	62,13	61,87
Vietnam	59,74	60,40	61,45	62,29	58,05	61,54
Laos	58,31	55,80	57,15	55,86	49,27	50,10
Kamboja	57,23	55,51	56,25	56,14	50,19	52,08

Sumber : *World Economic Forum, 2014-2019.*

Pada tabel diatas, terlihat Singapura adalah negara yang memiliki daya saing tertinggi Se ASEAN. Bahkan Singapura berada di posisi 3 besar dunia selama periode penelitian, puncaknya Singapura memperoleh ranking 1 dunia pada tahun 2019, ranking 2 dunia pada tahun 2018, 2016, 2015 dan 2014, kemudian ranking 3 besar dunia pada tahun 2017. Daya saing global Singapura tinggi karena

infrastruktur yang memadai, ketersediaan tenaga kerja ahli, aturan migrasi yang tidak menyulitkan serta upaya-upaya efisien untuk mendirikan usaha. Itulah mengapa Singapura dapat dikatakan sebagai negara kaya, maju dan sejahtera. Terlebih negara ini dapat menstabilkan nilai pertumbuhan ekonomi, dimana skala pertumbuhan ekonomi Singapura berada pada angka 1-3%. Tingkat pertumbuhan yang sehat adalah 2-3% (Amadeo, 2022).

Sedangkan daya saing global Malaysia terbilang stabil, konsisten pada angka 70-an. IDSG Indonesia, Thailand dan Filipina konsisten berada pada angka 60-an. Laos dan Kamboja konsisten pada angka 50-an. Dan Vietnam berfluktuasi pada angka 50-60an. Jika dibandingkan dengan Singapura, daya saing global negara ASEAN lainnya tidak sepadan. Walaupun IDSG ASEAN berbeda-beda, setiap pemerintah dalam suatu negara pasti mengupayakan kemajuan di negaranya untuk dapat maju dan berkembang.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel korupsi, demokrasi dan daya saing global terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2014-2019, apakah tepat kebijakan yang pemerintah terapkan dalam suatu negara tersebut, apakah kebijakan tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik ataukah tidak, jika kurang tepat maka penelitian ini diharapkan hadir sebagai solusi. Selain itu, latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana fungsi dan peran pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap korupsi, demokrasi dan daya saing global sebagai upaya menjaga kestabilan ekonomi negara, serta melihat negara mana yang paling baik untuk dijadikan sebagai *role model*, apa peran pemerintah dalam upaya pengontrolan dan pengendalian stabilitas ekonomi di bidang ekonomi publik dan fiskal, serta melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2014-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah dari penelitian yang dibahas, maka rumusan masalah yang akan saya jadikan objek penelitian adalah :

1. Apakah variabel korupsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN selama tahun 2014-2019 ?
2. Apakah variabel demokrasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN selama tahun 2014-2019 ?
3. Apakah variabel daya saing global berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN selama tahun 2014-2019 ?
4. Apakah variabel korupsi, demokrasi dan daya saing global berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN selama tahun 2014-2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN 2014-2019.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN 2014-2019.
3. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana pengaruh daya saing global terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN 2014-2019.
4. Mengidentifikasi secara bersama-sama pengaruh korupsi, demorasi dan daya saing global terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN 2014-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya variabel-variabel penunjang pertumbuhan ekonomi.
4. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan untuk menghadapi permasalahan pertumbuhan ekonomi ASEAN, khususnya Indonesia.
5. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi masyarakat Indonesia dan ASEAN agar dapat mengetahui kondisi perekonomian yang sedang berjalan pada tahun yang di teliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Setiap negara mempunyai sistem perekonomian, baik pada sistem perekonomian kapitalis, sosialis, ataupun campuran pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Pemerintah adalah lembaga-lembaga yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat (Prasetya, 2012). Menurut Prasetya, Pengertian pemerintah dalam arti sempit mengacu ke atas politik tingkat tertinggi dalam lembaga-lembaga tersebut. Artinya, bisa di katakan bahwa kondisi ekonomi dalam suatu negara juga tergantung pada peranan pemerintah dalam negaranya.

Pemerintah mempunyai dua peran besar dalam perekonomian, yaitu pembuat kebijakan fiskal dan moneter. Menurut teori Smith (dalam Prasetya, 2012) mengemukakan bahwa ada 3 fungsi pemerintah, yaitu :

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak di sediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya

Sedangkan menurut Musgrave (dalam Sari, 2018) fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu :

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*), yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*)

2. Fungsi Distribusi (Distribution Branch), yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis, yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada.
4. Fungsi Pembangunan, yaitu dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar dari pada negara maju.
5. Fungsi Pemberdayaan, fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan.

Pemerintah berfungsi sebagai akses penunjang pertumbuhan, kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial di negaranya. Dengan begitu, dibutuhkan peran pemerintah agar mengusahakan sumber-sumber ekonomi agar dapat berjalan dengan efisien.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Indikator keberhasilan pembangunan perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Perekonomian negara mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan pendapatan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB),

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. PDB Pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor).

Rumus Pertumbuhan Ekonomi :

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

G_t : Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)
 PDBR_t : Produk Domestik Bruto Riil periode t (harga konstan)
 PDBR_{t-1} : PDBR satu periode sebelumnya.

2.1.2.2. Teori Pertumbuhan

1. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Robert Solow dan Trever Swan mengembangkan teori pertumbuhan ini pada tahun 1950-an, sehingga teori ini dikenal juga dengan model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut

teori ini adalah modal, tenaga kerja dan teknologi. Teori ini meyakini peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus didukung oleh teknologi yang modern. Jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit.

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara menurut teori ini sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk meningkatkan kemampuan produksinya yang didukung oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar negara. Jumlah Output adalah fungsi dari tenaga kerja dan modal.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru (Endogen)

Teori pertumbuhan ekonomi baru (endogen) dikembangkan oleh Robert Lucas (1988) dan Paul Romer (1986). Mereka memiliki peran yang penting karena dapat menjelaskan model pertumbuhan yang lebih maju, dimana perubahan teknologi bersifat endogen (berasal dari dalam sistem ekonomi) dan memiliki pengaruh pertumbuhan dalam jangka panjang. Pengertian modal (faktor pertumbuhan ekonomi) dalam teori ini mencakup modal fisik dan modal manusia.

Sumberdaya manusia adalah modal utama untuk meningkatkan produksi dan ekonomi nasional. Teori ini menyatakan ketika tenaga kerja memiliki wawasan yang luas, pendidikan yang tinggi, dan pelatihan profesional bisa mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Hasilnya adalah kegiatan produksi nasional dapat di tingkatkan dengan lebih cepat (Ramadhani, 2020). Teori ini juga melihat pengaruh dan ketersediaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah dan birokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Fajar & Azhar, 2018).

2.1.3. Korupsi

2.1.3.1. Pengertian Korupsi

Menurut *Transparency International* (2021) korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan

semakin memperburuk ketidaksetaraan, kemiskinan, perpecahan sosial dan krisis lingkungan. Korupsi berdampak buruk pada integritas kepercayaan.

Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau social (Handoyo et al., 2021).

Transparency International (TI) adalah organisasi masyarakat sipil yang mendorong perlawanan global terhadap korupsi. Melalui hampir 100 kantor di seluruh dunia dengan sekretariat internasional di Berlin, Jerman, TI melakukan kampanye penyadaran atas dampak korupsi, dan bekerja sama dengan pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk mencegahnya (International, 2006). Indonesia juga memiliki LSM organisasi non-profit, bernama *Transparency International Indonesia* atau disingkat dengan TI Indonesia yang berdiri pada Oktober 2000. Indonesia juga bekerja sebagai usaha dunia untuk menghapus korupsi dengan cara mempromosikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam sistem administrasi pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil di Indonesia. Begitupun dengan negara ASEAN lainnya.

2.1.3.2. Bentuk Korupsi

Menurut *Transparency Internasional*, bentuk korupsi terbagi menjadi :

1. Penyuapan vs Uang Pelicin

Kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kepada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan uang pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam

pemeriksaan bagasi oleh pihak Bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran, misalnya pembayaran pajak. Kedua bentuk kejahatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi yang dilarang di hampir seluruh negara.

2. Supply vs Demand

Biasanya, praktik penyuapan dapat dilakukan apabila ada pertemuan antara si pemberi suap dengan si penerima suap; kasus terakhir (juga disebut sebagai pemerasan) seringkali diartikan sebagai “korupsi pasif”, akan tetapi arti istilah ini menjadi salah pengertian karena pelaku pemerasan akan mampu melakukan apa saja kecuali bersikap “pasif”.

3. Kartel atau Kolusi

Kartel biasanya sering terbentuk oleh para peserta tender dengan tujuan untuk memanipulasi pemenang tender, yang menguntungkan salah satu anggota kartel tersebut. Praktik yang juga digolongkan sebagai korupsi ini dapat dilakukan dengan atau tanpa tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya keterlibatan pejabat negara didalamnya. Sementara, kolusi biasanya merupakan bentuk kesepakatan dari peserta tender untuk menetapkan giliran pemenang tender atau kesepakatan pembayaran kompensasi kepada pihak yang kalah dalam tender karena memasukan penawaran yang lebih tinggi.

4. Struktural vs Situasional

Korupsi dalam konteks bisnis sering berbentuk “struktural”, yang berarti telah direncanakan dan dipersiapkan secara matang serta dijalankan secara sistematis. Seringkalinya untuk korupsi “situasional” adalah tanpa direncanakan, misalnya ketika seseorang mengemudi kendaraan dibawah pengaruh minuman keras dan kemudian tertangkap oleh petugas polisi, orang tersebut akan menawarkan uang suap kepada petugas tersebut dengan tujuan membujuknya agar tidak memberikan surat tilang.

2.1.3.3. Pelaku Korupsi

1. Pejabat publik (mewakili penguasa dari departemen pemerintah) Biasanya merupakan sebagai pimpinan atau ketua. Pimpinan ini menggunakan inisiatif kejahatan untuk memeras dan menerima suap dari peserta tender sebelum

membuat keputusan resmi yang sesuai dengan permintaan. Sebaliknya, pimpinan ini dapat juga dipilih atas inisiatif dari satu atau lebih peserta tender dan menerima suap sebagai imbalan dari keputusan yang dikehendaki.

2. Peserta Tender (penyalur, kontraktor, konsultan) dan sub-kontraktor Para pelaku ekonomi yang berkeinginan menjalin bisnis dengan pemerintah, melalui penyaluran barang atau jasa, biasanya selalu mengambil inisiatif untuk menawarkan uang suap atau keuntungan lainnya kepada pembuat kebijakan, Atau sebaliknya justru menjadi sapi perah pejabat yang korup.

3. Agen, Perantara, Konsultan, Rekanan Usaha dan Anak Perusahaan

Para pelaku ekonomi yang bertujuan memanipulasi proses pengambilan keputusan pemerintah sering kali tidak melakukan kejahatannya secara langsung, tetapi menggunakan agen-agen, konsultan, kontraktor, perantara lokal, anak perusahaan, dan rekan usahanya untuk melakukan penyuaipan. Kerjasama dengan agen juga dilakukan untuk mengaburkan pengawasan, pengungkapan dan pertanggungjawaban. Selain juga, menyiapkan pembayaran untuk memanipulasi nilai pajak dan selalu memunculkan adanya indikasi kejahatan dalam kontak perjanjian.

4. Penerima atau Pemberi Suap Ditingkat Pejabat (*sebagai pembeda dengan staf rendahan*)

Pengalaman negara-negara industri jelas menunjukkan bahwa – selain uang pelicin– kebanyakan pelaku korupsi (baik dari pihak swasta maupun pemerintah) bukanlah staf bawahan, namun dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, termasuk para manajer senior atau pejabat yang lebih tinggi.

5. Politisi

Politisi (terutama di tingkat kota) sering memiliki fungsi ganda (misalnya sebagai anggota dewan) sehingga memunculkan kerumitan dalam posisi hukum sehingga disebut sebagai “korupsi terhormat” (bagi pejabat, baik yang dibawah sumpah atau tidak)

6. Penyimpanan Hasil Korupsi (*Financial Safe Heaven*)

Korupsi akan sulit dilakukan bila kesempatan untuk menyembunyikan keuntungan korupsi atau pencucian uang korupsi tidak ada.

7. *Saksi*

Setiap orang yang mempunyai informasi tentang korupsi berkewajiban untuk menghentikannya. Bila tetap menutup mulut berarti sama saja ikut berpartisipasi dalam praktik korup. Meningkatnya mekanisme perlindungan saksi dan pelapor, tersedianya saluran *hot line* korupsi atau sistem lainnya akan memudahkan kemudahan bagi orang-orang yang ingin melakukan perubahan.

2.1.3.4. Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Ketika mayoritas pelaku korupsi adalah pemerintah, maka fasilitas yang di berikan kepada publik (masyarakat) akan berkurang dan tidak maksimal, sehingga akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan Negara. Korupsi akan mengurangi kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, ketika pelakunya adalah pemerintah. Model ekonomi dari Kpunde (2000) mengatakan bahwa meningkatnya korupsi akan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ketimpangan serta kemiskinan akan meningkat. Korupsi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, artinya korupsi juga menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prasetya (2012), untuk negara maju di mana tingkat korupsinya rendah, peran pemerintah dalam perekonomian hanya sebatas pembuat kebijakan dan peraturan, namun tetap mengawasi secara sungguh-sungguh jalannya pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut dengan harapan peran swasta dapat berjalan secara optimal. Kecenderungan korupsi sejalan dengan peringkat indikator "*control of corruption*". Hal ini membuktikan bahwa isu korupsi perlu di perhatikan dan tindaklanjutan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

2.1.4. Demokrasi

2.1.4.1. Pengertian dan Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati.

Teori Jean Jaques Rousseau mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan (Thalhah, 2009). Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Bisa di katakan, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat.

Menurut Abraham Lincoln (dalam Elizabeth, 2019) Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Penjabaran berdasarkan pengertian tersebut adalah:

1. Pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*) menandakan bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yg diberikan dari rakyat. Hal tersebut diwujudkan dari pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. rakyat harus didahulukan dan diutamakan.
2. Pemerintah oleh rakyat (*Government by the people*) menandakan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan negara. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya seharusnya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara maupun elit demokrasi. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyatnya.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*Government for the people*) Kepentingan rakyat diatas segalanya, sehingga kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat .

Menurut beberapa ilmuan (Sirait, 2018), pengertian demokrasi adalah :

1. Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan.
2. Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikutberpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.
3. Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik bahwa individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan caraperjuangan kompetitif atas suara rakyat.

4. Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting pemerintahan diperoleh secara bebas dari rakyat biasa.
5. Menurut Bonger, pengertian demokrasi dibagi menjadidua aspek yaitu pengertian secara formal dan materie. Demokrasi formal adalah demokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi materiel adalah demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Kemerdekaan dan persamaan dan juga sosial dan ekonomi.

Banyak para ilmuwan mendefinisikan pengertian demokrasi, namun dari beberapa pandangan mengenai demokrasi dari para ahli dapat di lihat pada intinya demokrasi adalah dasar hidup bermasyarakat dan bernegara, karena kebijakan tersebut rakyatlah yang juga memberikan penilaian kebijakan negaranya, dan menentukan nasib hidupnya.

Economist Intelligence Unit (2020) mengklasifikasi demokrasi terdiri dari 4 bagian, yaitu :

1. Demokrasi penuh, merupakan negara-negara yang di mana kebebasan sipil dan kebebasan berpolitik tidak hanya dihormati, namun juga diperkuat oleh budaya politik yang kondusif dan matang sehingga prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan. Negara-negara ini memiliki transparansi pemerintah yang bagus, independensi peradilan terlaksana, pemerintahan berfungsi dengan baik, dan banyak terdapat media massa yang independen. Negara-negara ini hanya memiliki cacat minimum dalam aspek demokrasi.
2. Demokrasi tidak sempurna, merupakan negara-negara yang dimana pemilu masih berlangsung secara adil dan bebas serta kebebasan dasar sipil dihormati, namun dimungkinkan juga memiliki sejumlah masalah, seperti pelanggaran terhadap kebebasan pers dan sedikit membatasi gerak para oposisi maupun pemerhati politik. Negara-negara ini juga memiliki cacat yang signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk memiliki budaya politik kaula, tingkat partisipasi yang rendah dalam politik, dan memiliki cukup banyak masalah dalam fungsi pemerintahan.
3. Rezim hibrida, merupakan negara-negara yang terdapat tindak kecurangan dalam pemilu reguler serta keberadaan negara dirasa sedikit menghalangi

rakyatnya untuk mendapatkan demokrasi yang adil dan bebas. Negara-negara ini umumnya mempunyai banyak masalah, seperti pemerintah yang memberikan tekanan kepada oposisi politik, peradilan yang tidak independen, korupsi yang merajalela, pelanggaran kebebasan pers dengan menekan dan menghambat para jurnalis, supremasi hukum yang lemah. Serta memiliki cacat yang lebih besar seperti pada budaya politik yang terbelakang, tingkat partisipasi politik yang rendah, dan permasalahan di dalam fungsi pemerintahan.

4. Rezim otoritarian, merupakan negara-negara yang di mana pluralisme politik tidak ada ataupun keberadaannya sangat terbatas. Negara-negara ini seringkali merupakan sebuah monarki absolut ataupun kediktatoran, yang mungkin memiliki beberapa lembaga demokrasi konvensional namun dengan sedikit intervensi di dalamnya. Pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan sipil, pemilihan umum (jika ada) yang tidak adil dan bebas, media massa yang ada sering kali dipegang oleh negara ataupun dikendalikan oleh kelompok-kelompok terkait dengan rezim yang sedang berkuasa, independensi peradilan yang tidak terlaksana, penyensoran serta penindasan terhadap pengkritik pemerintah adalah hal yang lazim ditemukan.

2.1.4.2. Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi

Banyak penelitian yang menyatakan demokrasi dapat meningkatkan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, salah satunya adalah penelitian dari Nairobi et al., (2020), dan Elizabeth (2019) serta peneliti lainnya. Namun banyak juga penelitian yang menyatakan demokrasi berpengaruh positif, negatif, signifikan dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Doucouliagous & Ulubasoglu, 2006). Hal ini menyatakan bahwa pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi bermacam-macam, namun tetaplah demokrasi penting dalam suatu negara.

Mengacu pada masa pra merdeka yang menganggap bahwa demokrasi sebagai penghambat pembangunan, dimana masyarakat tertindas akan penjajahan, maka pada zaman modern ini dimana kebebasan berpendapat sudah tidak lagi asing di dengar, demokrasi seharusnya bisa menjadi jawaban untuk mendukung pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rakyat memiliki fungsi kontrol sosial dan kebebasan untuk berpendapat. Jika

pejabat publik melakukan penyalahgunaan kebijakan yang dapat menyebabkan turunnya kesejahteraan, maka ini lah peran demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Dari tahun 1998 sampai dengan saat ini, Indonesia dikenal dengan demokrasi periode reformasi, diawali lengsernya presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Indikator demokrasi di Indonesia di era ini yaitu kebebasan pers untuk berpartisipasi dan berlakunya sistem multi partai (mulai diberlakukan pada pemilu tahun 1999), sehingga setiap warga negara yang mampu memenuhi syarat dapat memenuhi jabatan politik tanpa diskriminasi (Purnamawati, 2020). Pada tahun 2019, terdapat 14 partai politik nasional dan 4 partai lokal Aceh yang mengikuti pemungutan suara pemilu. Proses elektoral yang berlangsung dalam konteks demokrasi multipartai kompetitif menghadirkan biaya politik yang semakin tinggi, baik dalam skala daerah maupun nasional, sehingga akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dalam sistem dua partai seperti di Amerika Serikat, mekanisme pemilu lebih praktis karena paket calon yang diajukan sudah pasti hanya ada dua, sehingga pemenang dipastikan mencapai suara lebih dari 50% (Noviati, 2013). Efisiensi dan efektivitas biaya lebih dapat di kendalikan. Jika sistem AS di terapkan di Indonesia untuk saat ini, hal kurang cocok jika menggunakan sistem ini, karena terdiri dari banyak partai dan kebebasan untuk berdemokrasi telah dijamin oleh negara, namun tetap diperlukan adanya mekanisme pengaturan yang menyebabkan jumlah partai politik itu berkurang secara alamiah dengan sendirinya tanpa adanya larangan tanpa adanya pembatasan yang bersifat *imperative* agar terjadinya efektivitas dan efisiensi pada biaya demokrasi.

2.1.4.3. Demokrasi, Sistem Ekonomi dan Sistem Pemerintah

Sistem pemerintahan dalam suatu negara akan mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi dan kondisi demokrasi dalam suatu negara tersebut dan pada akhirnya berpengaruh pada keputusan kebijakan. Negara-negara ASEAN memiliki sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda-beda, maka kondisi sistem ekonomi dan demokrasi setiap negara pun akan berbeda. Menurut Gilarso (dalam Sumarsono, 2016) sistem ekonomi adalah

keseluruhan tatacara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, distribusi, investasi dan sebagainya sehingga terbentuk kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dapat dihindari.

Sistem ekonomi negara-negara didunia terdiri menjadi 2 macam, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis menjalankan segala aktivitasnya didasarkan oleh kepemilikan harta benda pemilik modal. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah segala bentuk kegiatan ekonomi didasarkan oleh pemerintah secara terpusat (Sumarsono, 2016). Sistem ekonomi bergantung pada sistem pemerintah dalam suatu negara.

Suni (dalam Noviati, 2013) mengatakan sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi dalam suatu negara. Sistem pemerintahan terbagi menjadi 4 model, model Inggris, Amerika Serikat (AS), Prancis dan Swiss. Model AS menganut sistem presidensiil, hampir semua negara di benua Amerika menerapkan model ini, kecuali Kanada. Model Inggris menganut sistem parlementer, benua Eropa dan kebanyakan negara ASIA menerapkan model ini. Model Prancis menganut sistem campuran, negara-negara bekas jajahan Prancis di Afrika menerapkan model ini. Sedangkan model Swiss berbeda dari 3 model sebelumnya, *collegial system* dimana dalam model ini negara memiliki presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh 7 anggota dewan federasi dan masa jabatan bergantian setiap tahun (Sumarsono, 2016). Dari penjelasan tersebut, rata-rata di negara ASEAN menganut sistem model Amerika dan model Inggris, sehingga di negara ASEAN memiliki bentuk pemerintahan bermacam-macam, mulai dari bentuk pemerintah kerajaan yang di anut oleh negara Malaysia dan Kamboja, dan bentuk pemerintah kepresidenan yang dianut oleh Laos, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia.

Sistem negara mempengaruhi kondisi demokrasi di dalam suatu negara tersebut, demokrasi terjadi di negara yang berbentuk pemerintahan republik, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, sehingga rakyat dapat berperan dalam proses pemilu. Rakyat juga dapat bersuara untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dalam suatu negara, termasuk kebijakan ekonomi. Berbeda dengan negara yang dipimpin dengan prinsip dari keturunan bangsawan atau biasa disebut dengan monarki. Monarki biasanya dijalankan oleh negara dengan bentuk pemerintahan kerajaan (dipimpin oleh raja, ratu atau sultan) dimana keputusan tertinggi berada di tangan bangsawan. Konsep Monarki mutlak hampir tidak ada lagi di gunakan dan saat ini kebanyakan yang dianut adalah monarki konstitusional, monarki absolut dan monarki demokrasi.

2.1.5. Daya Saing Global (Global Competitiveness Index)

2.1.5.1. Pengertian Daya Saing Global

Daya saing Global di keluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) setiap tahunnya dalam *Global Competitiveness Report* yang menggambarkan secara menyeluruh kinerja ekonomi negara-negara di dunia, termasuk ASEAN. Selain itu WEF juga menyusun *Global Competitiveness Index (GCI)* sebagai tolok ukur kinerja makroekonomi dan mikroekonomi daya saing suatu negara.

Global competitiveness index (GCI) atau indeks daya saing global adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI menyatakan indeks ini mengukur seberapa efisien suatu negara memanfaatkan faktor-faktor produksinya yang kemudian akan berujung pada upaya memaksimalkan produktivitas faktor total/*total factor productivity (TFP)* dan mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan intervensi kebijakan yang efektif.

Program Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Teknologi dan Ekonomi mendefinisikan bahwa daya saing suatu negara didasarkan pada produktivitas yang lebih baik kinerja dan kemampuan ekonomi untuk

meningkatkan output ke tingkat aktivitas yang lebih tinggi yang pada gilirannya dapat menghasilkan tingkat upah riil yang tinggi. Daya saing terkait dengan peningkatan taraf hidup, mengembangkan kesempatan kerja, dan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kewajiban internasionalnya. Daya saing dapat dibatasi sebagai lingkungan pasar terbuka, yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang lulus uji daya saing dan sekaligus mempertahankan dan memperluas pendapatan riil domestik (Nababan, 2019). Daya Saing Global di butuhkan semua negara, sebagai acuan pemantauan perkembangan ekonomi di kalangan internasional, termasuk negara ASEAN.

2.1.5.2. Tujuan, Sasaran dan Kegunaan Daya Saing Global

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI menyatakan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi :

1. Untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik.
2. Untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, entrepreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik.
3. Untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun tujuan Daya Saing Global daerah menurut Panduan Indeks Daya Saing Daerah Indonesia adalah :

1. Mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2. Menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
3. Sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia.

4. Menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
5. Menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah

2.1.5.3. Konsep Daya Saing Global

Adapun kerangka pembentuk indeks daya saing global secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 aspek, antara lain lingkungan yang mendukung/kondusif, modal manusia, aspek pasar dan ekosistem inovasi.

Tabel 5. Pilar Indeks Daya Saing Global

Lingkungan yang mendukung	
Pilar 1: Institusi	Pilar 2: Infrastruktur
A. Keamanan	A. Infrastruktur transportasi
B. Modal sosial	B. Infrastruktur utilitas
C. <i>Checks and balances</i>	Pilar 3: Adopsi TIK
D. Kinerja sektor publik	
E. Transparansi	Pilar 4: Stabilitas makroekonomi
F. Hak milik	
G. Tata kelola perusahaan	
H. Orientasi masa depan pemerintah	
Modal manusia	
Pilar 5: Kesehatan	Pilar 6: Keterampilan
	A. Tenaga kerja saat ini
	B. Tenaga kerja masa depan
Pasar	
Pilar 7: Pasar barang dan jasa	Pilar 9: Sistem keuangan
A. Persaingan pasar domestik	A. Kedalaman
B. Keterbukaan perdagangan	B. Stabilitas
Pilar 8: Pasar tenaga kerja	Pilar 10: Ukuran ekonomi
A. Fleksibilitas	
B. Meritokrasi dan insentif	
Ekosistem inovasi	
Pilar 11: Dinamika Bisnis	Pilar 12: Kemampuan inovasi
A. Persyaratan administratif	A. Keberagaman dan kolaborasi
B. Budaya kewirausahaan	B. Penelitian dan pengembangan
	C. Komersialisasi

Sumber : WEF, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa konsep daya saing global di bentuk oleh 4 aspek, yaitu lingkungan yang di ukur dari pilar institusi, infrastruktr, adopsi TIK, dan stabilitas makro ekonomi. Modal manusia yang di ukur dari pilar kesehatan dan keterampilan. Pasar yang di ukur dari pilar barang dan jasa, sistem keuangan, pasar tenaga kerja dan ukuran ekonomi. Terakhir yaitu ekosistem inovasi yang di ukur dari pilar dinamika bisnis dan kemampuan inovasi.

2.1.5.4. Daya Saing Global dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pernyataan dari *World Economic Forum (WEF)* yang mendefinisikan daya saing nasional adalah pacuan kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, maka dapat di katakana dan disimpulkan bahwa daya saing global sangat berpengaruh dan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. *Institute for Management Development (IMD)* mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan social.

European Commission pada tahun 2020 juga mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (*regions*) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal. Pengertian ini sesuai dengan konsep dan teori pertumbuhan ekonomi.

2.2. Tinjauan Empiris

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis mencoba mengidentifikasi dan mempelajari penelitian yang berkaitan dan relevan terhadap topik yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya, penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam ringkasan tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Tinjauan Empiris

1	Penulis	Muhammad Fajar dan Zul Azhar (2018)
	Judul	Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara - Negara Asia Tenggara
	Nama Jurnal	Ecogen
	Tujuan	Untuk mengetahui pengaruh korupsi dan pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN (2010-2015).
	Variabel	Indeks persepsi korupsi, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi
	Metode Penelitian	Regresi Panel
	Kesimpulan	Secara parsial indeks persepsi korupsi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa secara bersama-sama variabel korupsi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara.
2	Penulis	Rino Bagus Haryanto (2013)
	Judul	Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-5 Tahun 2002-2011
	Nama Jurnal	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya
	Tujuan	Untuk mengetahui pengaruh korupsi, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN
	Variabel	GDP, indeks persepsi korupsi, total pengeluaran konsumsi pemerintah, dan total penerimaan pajak
	Metode Penelitian	Regresi Panel
	Kesimpulan	Indeks persepsi korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan negara ASEAN. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif pada pertumbuhan negara ASEAN. Penerimaan pajak tidak berpengaruh pada pertumbuhan negara ASEAN.
3	Penulis	Lusi Defianti, Hasdi Aimon, dan Alianis (2020)
	Judul	Pengaruh Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

	Nama Jurnal	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan
	Tujuan	Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur, indeks pembangunan manusia dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (2014-2018)
	Variabel	Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, indeks pembangunan manusia, dan korupsi
	Metode Penelitian	Regresi Panel
	Kesimpulan	Infrastruktur (di ukur menggunakan infrastruktur jalan) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indeks pembagunan manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
4	Penulis	Amin Hafidz Haqiqi dan Husaeri Ardika Dwi Putra (2020)
	Judul	Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi
	Nama Jurnal	Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)
	Tujuan	Untuk menganalisis tentang pertumbuhan dan korupsi.
	Variabel	Korupsi dan pertumbuhan ekonomi.
	Metode Penelitian	Studi literatur
	Kesimpulan	Dari 14 objek penelitian yang di teliti, indeks persepsi korupsi rata-rata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberagaman masing-masing daerah di Indonesia membuat tingkat kebebasan ekonomi yang berbeda pula sehingga apabila suatu daerah memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi maka korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di daerah dengan tingkat kebebasan rendah korupsi membuat pertumbuhan ekonomi melambat atau rendah. Alur birokrasi yang disalahgunakan oleh pejabat membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang menyulitkan sehingga tingkat aktivitas ekonomi terhambat membuat pertumbuhan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia rendah. 5 dari 14 objek penelitian menyatakan korupsi berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi.
5	Penulis	Artauli Elizabeth (2019)
	Judul	Analisis Pengaruh Demokrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 2010-2017)
	Nama Jurnal	Institut Pertanian Bogor

	Tujuan	Menganalisis pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
	Variabel	Indeks demokrasi, indeks kebebasan sipil, indeks hak-hak politik, dan indeks lembaga demokrasi
	Metode Penelitian	Regresi Panel
	Kesimpulan	Demokrasi yang mapan berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Ketiga aspek yang menjadi gambaran demokrasi Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
6	Penulis	Nairobi Nairobi, Nur Rita Santi, Fadeli Yusuf
	Judul	<i>The Impact of the Quality of Democracy on the Economic Growth of Provinces in Indonesia</i>
	Nama Jurnal	Journal of Governance and Accountability Studies (JGAS)
	Tujuan	Mengkaji dampak kualitas demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (2011-2019).
	Variabel	Pertumbuhan ekonomi, demokrasi, tenaga kerja, penanaman modal asing, pertumbuhan awal.
	Metode Penelitian	Regresi Panel
	Kesimpulan	Indonesia secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam jangka panjang, demokrasi yang berkualitas cenderung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja dan investasi asing memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia di dukung meningkatnya tenaga kerja dan investasi asing mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbaikan demokrasi di Indonesia juga harus memperkuat demokrasi.
		Norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti pengurangan perilaku korupsi, khususnya korupsi politik dan politik uang dalam mendapatkan jabatan publik karena jika perilaku ini tidak dapat diperbaiki, maka demokrasi yang dihasilkan akan berdampak kecil pada perekonomian.
7	Penulis	Hristos Doucouliagos dan Mehmet Ulubasoglu (2008)
	Judul	<i>Democracy and Economic Growth : A meta-analisis</i>
	Nama Jurnal	Journal Semantic Scholar
	Tujuan	Membuktikan pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
	Variabel	Kebebasan ekonomi, pembangunan manusia, inflasi, kestabilan politik, ukuran pemerintah dan perdagangan internasional.

Metode Penelitian	Analisis meta-regresi	
Kesimpulan	<p>Bukti empiris yang telah terakumulasi selama 30 tahun terakhir menunjukkan demokrasi tidak menghambat perkembangan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi memiliki pengaruh positif tidak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pada pembentukan modal manusia, faktor akumulasi, tingkat kebebasan ekonomi, inflasi, ketidakstabilan politik, dan keterbukaan.</p> <p>Demokrasi dikaitkan dengan pengeluaran pemerintah yang lebih besar dan perdagangan internasional yang lebih bebas. Demokrasi juga memiliki pengaruh yang negatif pada pengeluaran pemerintah dan perdagangan bebas. Namun pengaruh positifnya adalah demokrasi tidak merugikan performa ekonomi.</p>	
8	Penulis	Wilson Rajagukguk (2018)
	Judul	Daya Saing (<i>Competitiveness</i>) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara : Studi Kasus Negara Berkembang
	Nama Jurnal	Universitas Kristen Indonesia
	Tujuan	Untuk mengetahui sebab negara bertumbuh lebih cepat dan mempunyai kinerja perdagangan yang baik serta untuk mengetahui kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengejar perbaikan dan kinerja relatif perekonomian.
	Variabel	Pertumbuhan ekonomi, daya saing teknologi, kapasitas, biaya dan permintaan.
	Metode Penelitian	Pooled Regression, regresi panel
	Kesimpulan	Daya saing teknologi, kapasitas, biaya, dan permintaan secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.
9	Penulis	Yadollah Dadgar, Rouhollah Nazari dan Fatemah Fahimifar (2018)
	Judul	<i>The Impact of Global Competitiveness Index (GCI) on Economic Growth in Iran and some Selected Countries</i>
	Nama Jurnal	Journal Social Science Research Network (SSRN)
	Tujuan	Untuk mengkaji dampak daya saing terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi dinegara Iran dan beberapa negara terpilih.
	Variabel	Pertumbuhan ekonomi, daya saing, modal, angkatan kerja, pendaftaran sekolah menengah
	Metode Penelitian	Regresi Panel

Kesimpulan	Indeks daya saing menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua kelompok negara. Semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di semua negara. Dampak modal fisik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berpenghasilan tinggi lebih tinggi daripada negara-negara menengah. Angkatan kerja sebesar 1% di negara-negara berpenghasilan tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 1%. Pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua kelompok negara secara signifikan positif. Pada saat yang sama, pengaruh indeks daya saing lebih besar di negara-negara berpenghasilan menengah.
10 Penulis	Nababan dan Tongam Sihol (2019)
Judul	<i>Development Analysis of Global Competitiveness Index of ASEAN -7 Countries and Its Relationship on Gross Domestic Product</i>
Nama Jurnal	Munich Personal RePec Archive
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui perkembangan GCI negara-negara ASEAN-7 sebagai gambaran kinerja dan potensi ekonomi. 2. Untuk mengetahui faktor atau pilar mana yang menjadi pendorong peningkatan GCI 3. Menganalisis pengaruh PDB terhadap GCI
Variabel	Pertumbuhan ekonomi dan indeks daya saing
Metode Penelitian	<i>Analisis Regresi Logaritmik</i>
Kesimpulan	<p>Selama periode tahun 2008/2009 hingga tahun 2016/2017, peringkat dan indeks GCI masing-masing negara ASEAN-7 terus meningkat. PDB negara-negara ASEAN-7 berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks daya saing global, kecuali Thailand.</p> <p>Pilar subindeks kebutuhan dasar masih mendominasi yang terbesar kontribusi terhadap peningkatan indeks daya saing Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Adapun sub-indeks efisiensi Malaysia dan Singapura menambah dan inovasi-kecanggihan telah mampu memberikan kontribusi terbesar bagi perbaikan GCI. Faktor yang paling bermasalah dalam meningkatkan indeks daya saing adalah korupsi, tenaga kerja yang kurang terdidik, akses pembiayaan, regulasi perpajakan, dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien.</p>

Terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian penulis merupakan gabungan dari berbagai ide-ide penelitian terdahulu dan digunakan pembaruan terhadap variabel-variabel independen yang digunakan, waktu penelitian, dan tempat penelitian, sehingga penelitian ini

diharapkan dapat menyempurnakan dari berbagai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah bagian dari negara yang tergabung dalam negara ASEAN, dan setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Mengacu pada teori yang di kemukakan Smith tentang fungsi pemerintah, yaitu memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan keadilan serta menyediakan barang-barang yang tidak di sediakan oleh pihak swasta serta mengacu pada teori Musgrave yang mengemukakan fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah adalah berupa fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, pembangunan dan pemberdayaan maka setiap pejabat publik (pemerintah) memiliki peranan dan kewajiban yang sangat penting untuk mencapai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Tujuan utama pembangunan dan fungsi pemerintah dalam suatu negara adalah meraih kesejahteraan. Menurut beberapa penelitian kesejahteraan dapat di ukur melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perekonomian dalam suatu negara yang dapat di ukur melalui pendapatan nasional.

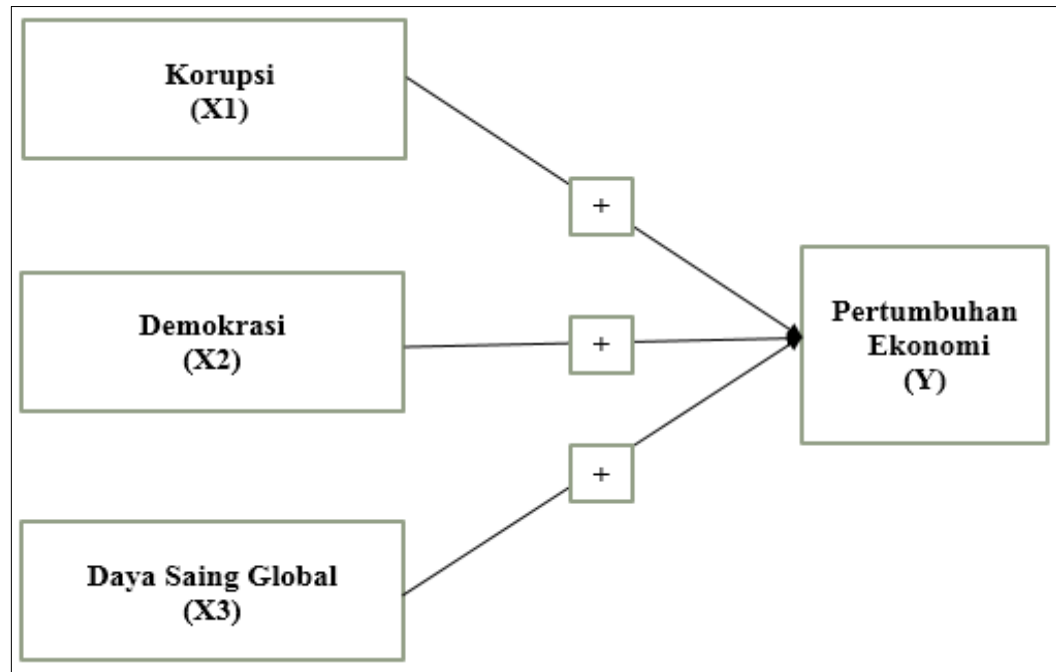
Berdasarkan tinjauan teoritis dan empiris, maka variabel bebas yang dipilih dalam penelitian ini adalah korupsi, demokrasi dan daya saing global. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pengaruh dari nilai pendapatan nasional yang dinyatakan dalam satuan harga/besaran nominal. Nilai pertumbuhan ekonomi bisa berubah sejalan dengan perubahan jumlah produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan adanya peningkatan produksi barang atau jasa secara fisik dalam periode tertentu.

Korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika korupsi meningkat maka akan terjadi kerugian yang besar kepada masyarakat, baik itu dari segi sarana dan prasarana, maupun pelayanan-pelayanan yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Pemerintah yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana (berupa anggaran) untuk menunjang aktivitas dan produktivitas ekonomi, karena

tindakan korupsi fungsi alokasi (fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik), fungsi distribusi dan fungsi lainnya tidak akan maksimal di dapatkan oleh rakyat. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya ketika korupsi dalam suatu negara mendekati angka 100, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, begitupun sebaliknya.

Demokrasi dapat di katakan kebebasan, kebebasan dalam berpendapat dengan bertanggungjawab. Demokrasi identik dengan kekuasaan dari dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki peran dan fungsi untuk menunjang dan mengontrol sistem pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam Demokrasi, semua berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demokrasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika indeks demokrasi mendekati angka 10, maka pertumbuhan ekonomipun akan meningkat.

Dan terakhir adalah variabel daya saing global. Daya saing global mengukur produktivitas suatu negara, sering diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dibuat tetapi juga harus berkelanjutan yang dapat ditunjukkan dengan indeks yang tinggi. Oleh karena itu, daya saing global mengandung komponen jangka pendek dan komponen jangka panjang komponen yang dapat menjelaskan potensi pertumbuhan ekonomi. Daya saing global memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka indeks, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang saya buat dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa korupsi (IPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN tahun 2014-2019.
2. Diduga bahwa demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN tahun 2014-2019.
3. Diduga bahwa daya saing global berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN tahun 2014-2019.
4. Diduga bahwa korupsi, demokrasi dan daya saing global secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2014-2019.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis data dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data penelitian ini di dapatkan dan di publikasikan oleh lembaga-lembaga antara lain *World Bank*, *Transparency International*, *Economist Intelligence Unit*, *World Economic Forum*, dan *Country Economy*. Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependen*) yaitu pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel bebas (*independent*) yaitu korupsi, demokrasi dan daya saing global. Ruang lingkup penelitian ini mencakup 7 Negara di ASEAN selama 6 tahun periode penelitian, yaitu tahun 2014 – 2019.

Objek penelitian ini hanya menggunakan 7 negara di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos dan Kamboja. Hal ini disebabkan karena terdapat kendala dalam data objek dari 3 negara anggota ASEAN lainnya. Singapura memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang rendah (1 hingga 4%) tetapi memiliki nilai indeks persepsi korupsi dan indeks daya saing global yang paling tinggi diantara negara ASEAN selama periode penelitian. Ketika Singapura di masukkan dalam regresi penelitian, maka data tidak terdistribusi normal.

Brunei Darussalam memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang paling rendah (minus, hingga 3 tahun berturut-turut) dan tidak memiliki data yang lengkap pada semua variabel bebas. Begitupun dengan Myanmar yang tidak memiliki data yang lengkap pada variabel indeks daya saing global. Sehingga diputuskan hanya menggunakan 7 negara ASEAN.

Data panel adalah kombinasi dari data *time series* dengan periode tahun 2014 – 2019 dan data *cross section* dengan mencantumkan sebanyak 7 negara yang ada di ASEAN. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini di rangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Ringkasan Variabel Penelitian

No.	Nama Variabel	Simbol Variabel	Periode	Satuan Ukuran	Sumber Data
1.	Pertumbuhan Ekonomi	PE	Tahunan	Persen	World Bank
2.	Korupsi	KO	Tahunan	Indeks	Transparency International
3.	Demokrasi	DE	Tahunan	Indeks	Economist Intelligence Unit
4.	Daya Saing Global	DS	Tahunan	Indeks	World Economic Forum

3.2. Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel terikat (dependen) dari penelitian adalah pertumbuhan ekonomi (PE). Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. PE di ukur dengan menggunakan data tingkat laju pertumbuhan setiap negara dalam persentase tiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan data konstan dalam bentuk persen di negara ASEAN. Menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PE_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

PE_t : Pertumbuhan Ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

PDRB_t : Produk Domestik Bruto Riil periode t (harga konstan)

PDRB_{t-1} : PDBR satu periode sebelumnya

3.2.2. Korupsi

Pengertian korupsi menurut *Transparency International* adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untk keuntungan pribadi. Untuk menghitung

korupsi, digunakanlah Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK (*Corruption Perception Index*) adalah hasil survei yang dirilis setiap tahunnya oleh *Transparency International* yang menilai negara-negara pada tingkat korupsi.

Cara mengukur IPK adalah dengan menggunakan metodologi pemilihan data sumber, penskalaan ulang data sumber, penggabungan data yang diskalakan ulang, dan ukuran statistik yang menunjukkan tingkat kepastian. Mekanisme kontrol kualitas juga dimasukkan, yang terdiri dari pengumpulan dan penghitungan data independen oleh dua peneliti internal dan dua peneliti akademis independen.

Sedangkan sumber IPK adalah mengambil dari 13 set data, termasuk data yang di rilis oleh *African Development Bank*, *Asian Development bank*, *World Bank*, *Economst Intelligence Unit*, *Global Insaight*, *Bertelsman Founation*, *International Institute for Management Development*, *The PRS Group. Inc*, *Worls Justice Project*, *Political and Economic Risk Consultasy* dan *Freedom House*.

Sebuah negara dinilai tidak kurang dari tiga sumber. Sumber harus mendokumentasikan metode pengumpulan data dan pendekatan pengukuran, setelah itu *Transparency International* akan menilai kualitas dan kecukupan metodologi yang di laporkan (Kenton, 2021).

Skor IPK adalah 0 – 100. IPK yang rendah menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi, sementara IPK yang lebih tinggi menunjukkan sistem yang bersih dan sedikit yang melakukan tindak korupsi. Sedangkan menurut Leff (1964) ; Leys (1965) ; Lui, (1985) dalam jurnal (Lutfi et al., 2020) mengatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pembayaran insentif untuk menghapus peraturan pemerintah yang tidak efisien, mempercepat birokrasi serta mendapatkan kemudahan izin usaha yang lebih cepat dengan cara menyuap pejabat publik. Simpulannya adalah korupsi dapat meningkatkan efisiensi terutama di sektor publik.

3.2.3. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Cara mengukur demokrasi adalah dengan menggunakan Indeks demokrasi (ID). ID

berskala 0-10, yang berarti semakin mendekati angka 10 maka demokrasi dalam suatu negara semakin luas. ID adalah rata-rata berdasarkan jawaban dari 60 indikator pertanyaan, dengan masing-masing dua atau tiga alternatif jawaban yang diperbolehkan. Sebagian besar jawabannya merupakan penilaian dari para ahli. Beberapa jawaban lainnya didasarkan pada hasil survei opini publik dari masing-masing negara. Dalam kasus negara yang hasil surveinya tidak tersedia, maka hasil survei negara yang dianggap mirip serta penilaian tambahan dari para ahli dapat digunakan untuk mengisi jawaban dari indikator pertanyaan yang kosong. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan dan partisipasi politik serta budaya politik. Dari lima kategori tersebut, skor kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan indeks demokrasi suatu negara. Terakhir, skor dibulatkan menjadi dua desimal, yang akan menentukan klasifikasi tipe rezim negara.

Tabel 8. Klasifikasi Demokrasi

Jenis rezim	Skor
Demokrasi penuh	8,01 – 10
Demokrasi tidak sempurna	6,01 – 8
Rezim hibrida	4,01 – 6
Rezim otoritarian	0 – 4

Sumber : *Economist Intelligence Unit, 2021*

3.2.4. Daya Saing Global

Daya saing global adalah pacuan kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Cara mengukur daya saing global adalah dengan menggunakan indeks. Indeks daya saing global (IDSG) berskala 0-100, artinya jika indeks semakin mendekati angka 100, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu negara untuk mencapai faktor-faktor produktivitas sumberdaya yang tersedia di negaranya. IDSG menilai kemampuan negara-negara untuk memberikan tingkat kemakmuran yang tinggi kepada warganya (Weforum, 2014). Oleh karena itu, IDSG mengukur serangkaian institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kemakmuran ekonomi saat ini dan jangka menengah yang berkelanjutan.

Adapun kerangka pembentuk IDSG secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 aspek, antara lain lingkungan yang mendukung/kondusif (*enabling environment*), modal manusia (*human capital*), aspek pasar (*markets*), dan ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*).

3.3. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan model analisis regresi data panel untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Metode ini digunakan karena data panel merupakan gabungan dua jenis data, *time series* dan *cross section* yang mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar dan dengan menggunakan data panel dapat mengatasi masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*) Widarjono (2018).

3.3.1. Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2018) data panel adalah kombinasi data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan, ataupun perorangan. Penggabungan kedua jenis data dapat dilihat bahwa variabel terikat yang terdiri dari beberapa unit negara (*cross section*), namun dalam berbagai periode waktu (*time series*). Data yang seperti inilah yang disebut dengan data panel.

Dalam analisis model data panel dikenal tiga pendekatan yang terdiri dari Efek Sederhana/Umum (*Common Effect Model*), Efek Tetap (*Fixed Effect Model*), dan Efek Acak (*Random Effect Model*). Menurut Gujarati (dalam Munajat, 2015) data panel memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

1. Data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Sehingga diperoleh *degree of freedom* (df) yang lebih besar sehingga estimasi yang dihasilkan lebih baik.

2. Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul karena ada masalah penghilangan variabel.
3. Data panel mampu mengurangi kolinearitas antar variabel.
4. Data panel lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak mampu dilakukan oleh data *time series* murni dan *cross section* murni.
5. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang di observasi lebih banyak.

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

Y_{it}	= variabel terikat (dependent)
X	= variabel bebas (independent)
i	= entitas ke-i
t	= periode ke-t

Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 KO_{it} + \beta_2 DE_{it} + \beta_3 DS_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

PE_{it}	= Pertumbuhan Ekonomi (persen)
KO_{it}	= Korupsi (indeks)
DE_{it}	= Demokrasi (indeks)
DS_{it}	= Daya Saing Global (indeks)
i	= Menunjukkan lintas jumlah individu (<i>cross section</i>)
t	= Menunjukkan dimensi runtut waktu (<i>time series</i>)
β_0	= Konstanta (<i>intercept</i>).
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi.
μ_{it}	= <i>Error term</i> .

3.4. Prosedur Analisis Data

3.4.1. Metode Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi menggunakan data panel umumnya menggunakan salah satu dari tiga metode perhitungan, yaitu metode *Common Effect Model* (CEM), metode *Fixed Effect Model* (FEM), dan metode *Random Effect Model* (REM). Ketiga metode tersebut sangat berbeda satu sama lain.

3.4.1.1. Metode *Common Effect Model* (CEM)

Estimasi metode ini merupakan bentuk estimasi paling sederhana dalam pengujian data panel yaitu hanya mengkombinasikan data lintas individu (*cross-section*) dan runtut waktu atau *time series*.

Berikut persamaan untuk model CEM (Gujarati, 2012) :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	= Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
X_{1it} dan X_{2it}	= Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
β_0	= Konstanta (<i>intercept</i>)
β_1 , dan β_2	= Koefisien regresi

3.4.1.2. Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa konstanta (*intercept*) antar lintas individu adalah berbeda namun kemiringannya tetap sama (Gujarati, 2012). Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel boneka (*dummy variable*) untuk menangkap adanya perbedaan intersep (Widarjono, 2018). Fungsi *dummy* yaitu untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar lintas individu. Menurut Gujarati (2012) persamaan model ini lebih dikenal dengan teknik *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Persamaan LSDV dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \beta_n D_{nit} + \mu_{it}$$

Keterangan :

Y_{it}	= Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
X_{1it} dan X_{2it}	= Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
$D_1, D_2, D_3 \dots D_n$	= 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk lintas individu yang tidak berpengaruh
β_0	= Konstanta (<i>intercept</i>)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$	= Koefisien regresi

3.4.1.3. Metode *Random Effect Model* (REM)

Metode *Random Effect Model* (REM) menggunakan pendekatan variabel gangguan (*error term*) untuk mengetahui hubungan antara lintas individu dan runtut waktu Widarjono (2018). Metode ini cenderung melihat perubahan antar individu dan antar waktu. Pemodelan sebelumnya yaitu *Fixed Effect Model* dengan tambahan variabel boneka (*dummy variable*) dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi.

Sehingga metode REM hadir dengan menyempurnakan model FEM dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) Widarjono (2018).

Persamaan model REM sebagai berikut Gujarati (2012) :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Dengan memperlakukan β_0 sebagai tetap (*fixed*), kita mengasumsikan bahwa konstanta adalah variabel acak dengan nilai rata-rata β dan nilai konstanta untuk masing-masing unit lintas individu (*cross section*) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\beta_{0i} + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, N$$

di mana μ_{it} adalah *random error term* dengan nilai rata-rata adalah nol dan variasi adalah $\beta_0^2 \mu$ (konstan). Secara esensial, kita ingin mengatakan bahwa semua individu yang masuk ke dalam sampel diambil dari populasi yang lebih besar dan mereka memiliki nilai rata-rata yang sama untuk konstanta (β_0) dan perbedaan individual dan nilai konstanta setiap individu akan direfleksikan dalam error term (μ_i). Dengan demikian persamaan *Random Effect Model* (REM) awal dapat dituliskan kembali menjadi :

$$Y_{it} = \beta_0 i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_i + \mu_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_0 i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + w_{it}$$

Dimana :

$$w_{it} = \varepsilon_i + \mu_{it}$$

Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih antara FEM atau REM adalah (Gujarati, 2012) :

1. Bila t (jumlah unit *time series*) lebih besar dari pada i (jumlah unit *cross section*), maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda, sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung, yaitu FEM.
2. Bila i lebih besat dari t , maka hasil estimasi kedua pendekatan akan jauh berbeda, sehinga dianjurkan menggunakan REM.
3. Apabila komponen eror individual (ε_{it}) berkorelasi dengan variabel bebas (X) maka parameter yang diperoleh dengan REM akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan FEM tidak bias.
4. Apabila i lebih besar daripada t , kemudian apabila asumsi yang mendasari REM dapat terpenuhi, maka REM lebih efisiesn dibandingkan FEM.

3.4.2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Estimasi data panel terdiri dari tiga (3) macam metode yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tentu dalam suatu pengujian diharuskan memilih permodelan yang terbaik. Terdapat 3 uji untuk memilih model yang terbaik, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*.

3.4.2.1. Uji Chow

Pengujian ini dilakukan dilakukan untuk memilih pemodelan terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Langkahnya adalah dengan melihat nilai probabilitas F. dan batas kritis.

Adapaun hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 = CEM lebih tepat dibandingkan FEM

H_a = FEM lebih tepat dibandingkan CEM

Pengambilan keputusan dilakukan jika :

Nilai prob. F < batas kritis (α) 0,05, maka tolak H_0 atau memilih FEM dari pada CEM

Nilai prob. F > batas kritis (α) 0,05, maka menerima H_0 atau memilih CEM dari pada FEM

3.4.2.2. Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih model *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dalam estimasi data panel.

Adapaun hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 = REM lebih tepat dibandingkan FEM

H_a = FEM lebih tepat dibandingkan REM

Pengambilan keputusan dilakukan jika :

Nilai *chi squares* hitung > nilai probabilitas *chi squares* < taraf signifikansi, maka tolak H_0 atau memilih FEM dari pada REM.

Nilai *chi squares* hitung < nilai probabilitas *chi squares* > taraf signifikansi, maka menerima H_0 atau memilih REM dari pada FEM.

3.4.2.3. Uji *Lagrange Multiplier*

Pengujian ini dilakukan unguan tuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Adapaun hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 = CEM lebih tepat dibandingkan REM

H_a = REM lebih tepat dibandingkan CEM

Pengambilan keputusan dilakukan jika :

Nilai probabilitas (*Both*) *Breussch-Pagan* < batas kritis (α) 0,05, maka tolak H_0
atau memilih REM dari pada CEM

Nilai probabilitas (*Both*) *Breussch-Pagan* > batas kritis (α) 0,05, maka menerima
 H_0 memilih CEM dari pada REM

Sakti (2018) mengatakan tidak selamanya ketiga uji tersebut lakukan, jika peneliti ingin menangkap adanya perbedaan intersep yang terjadi antar perusahaan maka model *common effect* diabaikan sehingga hanya dilakukan uji hasuman. Pemilihan FEM atau REM juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah waktu dan individu pada penelitian.

Menurut Nachrowi & Hardius (dalam Sakti, 2018) beberapa ahli ekonometrika telah membuktikan secara matematis, di mana dikatakan bahwa:

1. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan model *fixed effect*.
2. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan model *random effect*.

Sakti juga mengatakan dalam teknis pengujian di *e-views* akan lebih relevan jika dari awal peneliti mengabaikan model *common effect* karena data penelitian yang bersifat panel memiliki perbedaan karakteristik individu maupun waktu.

Sedangkan model *common effect* hanya mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu maupun individu.

3.4.3. Pengujian Asumsi Klasik

Asumsi klasik harus dipenuhi agar estimator OLS yang tersedia menjadi yang terbaik karena hal tersebut sangat penting dalam analisis regresi, maka syarat-syarat yang perlu terpenuhi yaitu, tidak bias, linier, dan mempunyai varian yang minimum (BLUE = *Best Linear Unbiased Estimator*). Menurut Widarjono (2018) terdapat beberapa pengujian untuk mengetahui apakah model estimasi yang telah dibuat menyimpang dari asumsi-asumsi klasik atau tidak, seperti uji linieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan normalitas. Namun tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS. Uji linieritas hampir tidak pernah dilakukan pada setiap model regresi karena diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata hanya untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya. Masalah autokorelasi hanya terjadi pada data-data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data selain *time series* akan tidak ada artinya. Begitupun dengan masalah heteroskedastisitas yang umumnya hanya terjadi pada data kerat lintang (*cross section*). Uji normalitas dan pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Widarjono (2018) mengatakan estimator yang BLUE tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah multikolinieritas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa uji asumsi klasik tidak digunakan pada regresi data panel. Namun jika tetap ingin melakukan uji asumi klasik di perbolehkan jika hanya untuk melakukan pembuktian.

3.4.3.1. Uji Asumsi Normalitas

Menurut Widarjono (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual hasil regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian untuk mengetahui normalitas data melalui Uji Jarque-Bera (J-B), metode J-B ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic*. Apabila residunya tersebar

normal maka terdapat normalitas pada data. Ketika data tidak normal, maka pengujian asumsi klasik tidak dapat dilanjutkan.

Adapun Hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 = data residual berdistribusi normal

H_a = data residual tidak berdistribusi normal

Kaidah keputusan Uji Normalitas metode Jarque-Bera yaitu (Widarjono, 2018) :

H_0 diterima jika nilai probabilitas Jarque-Bera $>$ taraf signifikansi (α) atau 0,05.

H_0 ditolak jika nilai probabilitas Jarque-Bera $<$ taraf signifikansi (α) atau 0,05.

3.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai, dengan kata lain ekspektasi dari eror yang berbeda dari periode waktu. Dampak dari adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya tetap konsisten dan tidak bias. Eksistensi dari masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil uji t dan uji F menjadi tidak berguna (*miss lending*).

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan menggunakan *Glejser*. Untuk mengetahui apakah pola variabel gangguan mengandung heteroskedastisitas atau tidak, maka metode ini menyarankan untuk melakukan nilai regresi nilai absolut residual dengan variabel independennya (Widarjono, 2018).

Adapun Hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 = Tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi

H_a = Ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi

Kaidah keputusan Uji Heteroskedastisitas metode Uji Glejser :

H_0 diterima jika nilai *Probabilitas t-statistik masing-masing variabel bebas* $>$ taraf signifikansi (α) 5% atau 0,05.

H_0 ditolak jika nilai *Probabilitas t-statistik masing-masing variabel bebas* $<$ taraf signifikansi (α) 5% atau 0,05.

3.4.3.3. Uji Asumsi Multikolinieritas

Adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam satu regresi disebut Multikolinieritas (Widarjono, 2018). Data yang terdapat Multikolinieritas akan cenderung menyesatkan karena estimasi variabelnya tidak tepat. Dampaknya model tidak dapat digunakan sebagai peramalan. Penelitian ini menggunakan uji asumsi multikolinieritas dengan metode korelasi parsial antar variabel (korelasi berpasangan). Sebagai aturan main kasar (*rule of thumb*), jika koefisien korelasi cukup tinggi (diatas 0,85) maka di duga terdapat multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2018).

Menurut Widarjono (2018) ada beberapa cara untuk menghilangkan multikolinieritas, yaitu :

1. Menghilangkan variabel independen
2. Transformasi variabel
3. Penambahan Data
4. Metode VIF (*Variance Inflation Factor and Tolerance*)

Adapun Hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 = Tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas pada model regresi

H_a = Ada multikolinieritas antara variabel bebas pada model regresi

Kaidah keputusan Uji Multikolinieritas metode Korelasi Berpasangan :

H_0 diterima jika nilai korelasi antar variabel bebas $>$ 0,85

H_0 ditolak jika nilai korelasi antar variabel bebas $<$ 0,85

3.4.3.4. Uji Asumsi Autokorelasi

Uji autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan yang lain (Widarjono, 2018). Ada banyak cara uji

Autokorelasi, namun dalam penelitian ini menggunakan metode *Durbin Watson* (DW test).

Adapun Hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 = Tidak ada Autokorelasi pada model regresi

H_a = Ada Autokorelasi pada model regresi

Kaidah keputusan Uji Autokorelasi metode *Durbin Watson* (DW test) :

- a. $dU < DW < 4 - dU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi Autokorelasi
- b. $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi Autokorelasi
- c. $dL < DW$ atau $4 - dU < DW < 4 - dL$, artinya tidak ada kepastian atau simpulan yang pasti.

Kriteria Alternatif : Nilai DW diantara -2 dan +2 ($-2 < dw < +2$) tidak terjadi Autokorelasi

3.4.4. Pengujian Hipotesis

Komponen utama dalam pengujian ekonometrika adalah pengujian hipotesis. Pengujian ini memiliki manfaat dalam penarikan kesimpulan penelitian, selain itu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Di dalam melakukan pengujian hipotesis terdapat 3 (tiga) bentuk pengujian yang akan dilakukan yaitu uji signifikansi parameter individual (uji t), uji signifikansi simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

3.4.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi parameter individual (uji t statistik) melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas (*explanatory variable*) secara individual terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Pengujian ini berdasarkan pada nilai yang bernilai positif dan negatif.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika nilai prob. t-statistik $<$ taraf signifikansi

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika nilai prob. t-statistik $>$ taraf signifikansi

Jika H_0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji-t adalah sebagai berikut :

1. Korupsi

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ korupsi (IPK) diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2014-2019

$H_a : \beta_1 > 0$ korupsi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2014-2019

2. Demokrasi

$H_0 : \beta_2 \leq 0$ demokrasi diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2014-2019

$H_a : \beta_2 > 0$ demokrasi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2014-2019

3. Daya Saing Global

$H_0 : \beta_4 \leq 0$ daya saing global diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2014-2019

$H_a : \beta_4 > 0$ daya saing global diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2014-2019

Menurut Gujarati (dalam Sakti, 2018), pengambilan keputusan uji t dilakukan jika:

Uji satu arah sisi kanan (positif) :

1. Nilai prob. t-statistik < taraf signifikansi, maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
2. Nilai prob. t-statistik > taraf signifikansi, maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Uji satu arah sisi kiri (negatif) :

1. Nilai prob. t-statistik < taraf signifikansi, maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
2. Nilai prob. t-statistik > taraf signifikansi, maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.4.4.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat.

Adapun hipotesis yang digunakan yaitu :

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3 = 0$, seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_1; \beta_2; \beta_3 \neq 0$, setidaknya 1 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dengan pengambilan keputusan :

Nilai F hitung > nilai prob. F-statistik < taraf signifikansi, maka tolak H_0 atau yang berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

Nilai F hitung < nilai prob. F-statistik > taraf signifikansi, maka menerima H_0 atau yang berarti bahwa variabel bebas secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat.

3.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Gujarati (2012) besarnya R^2 dikenal sebagai koefisien determinasi (sampel) yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari sebuah garis regresi. Nilai tersebut melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap variabel dependen, dimana nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Koefisien determinasi berkisar antara nol (0) sampai dengan satu (1), dimana disimbolkan dengan $0 \leq R^2 \leq 1$. Hal ini berarti bahwa bila $R^2 = 0$, maka menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel-variabel independen variabel terhadap dependen. Semakin kecil R^2 mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel-variabel dependen. Sebaliknya apabila R^2 semakin mendekati 1, maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel-variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh kesimpulan berikut :

1. Korupsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN tahun 2014-2019.
2. Demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN tahun 2014-2019.
3. Daya saing global berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN tahun 2014-2019.
4. Korupsi, demokrasi dan daya saing global secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN tahun 2014-2019.

5.2. Saran

1. Meskipun korupsi tidak berpengaruh signifikan dalam periode dan negara penelitian sebaiknya korupsi di kurangi disertai dengan pengontrolan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (kisaran 2-3%), karena dengan hal ini maka pertumbuhan ekonomi dan indeks persepsi korupsi akan baik dalam suatu negara, khususnya ASEAN. Simpulannya, kelambanan pemerintah dalam mencegah serta menangani tindakan korupsi di negara ASEAN menyebabkan terguncangnya stabilitas politik serta keamanan dan pembangunan dalam negeri.
2. Demokrasi di negara ASEAN disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Mengingat negara ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan sistem perekonomian yang berbeda-beda. Tentunya setiap kebijakan pemerintah memiliki kelebihan dan kekurangan, hal ini yang menjadi dasar bersuaranya

masyarakat dalam suatu negara. Selain itu, masyarakat juga berfungsi sebagai *social control* pemerintah. Namun pemerintah sebagai pemangku pengambilan keputusan memiliki kuasa penuh untuk menentukan kebijakan. Jadi, demokrasi bukanlah suatu yang buruk dalam suatu negara, namun pemerintah perlu membatasi jumlah partai, karena semakin banyaknya partai semakin banyak pula anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Demokrasi juga dapat mendorong institusi yang lebih baik.

3. Untuk meningkatkan daya saing global, negara-negara ASEAN perlu melakukan perbaikan pada sub-indeks dan pilar daya saing dengan menyesuaikan kategori tahapan pertumbuhan dan pembangunan di negaranya. Peran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sangat penting di maksimalkan terutama dengan memperhatikan modal manusia dan institusi, karena sumberdaya manusia dan institusi adalah faktor utama untuk menunjang faktor-faktor daya saing lainnya, terkhusus pada faktor teknologi, lingkungan dan inovasi.

Vietnam, Laos dan Thailand memiliki nilai *individual effect* yang rendah dari negara ASEAN lainnya. Vietnam harus lebih memfokuskan keterampilan tenaga kerja serta perbaikan institusi untuk meningkatkan investasi asing. Laos harus berfokus pada peran pemerintah dalam upaya memaksimalkan faktor infrastruktur, teknologi dan lingkungannya. Mempertahankan dan memberdayakan sumberdaya alam yang dimiliki, serta melakukan perbaikan pada faktor inovasi dan institusi adalah upaya yang harus dimaksimalkan Thailand untuk meningkatkan daya saing global dan pertumbuhan ekonomi negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadeo, K. (2022, Maret 30). What is the ideal GDP growth rate ?. *The Balance Post*. <https://www.thebalance.com/what-is-the-ideal-gdp-growth-rate-33060717>
- Dadgar, Y., Nazari, R., & Fahimifar, F. (2018). The Impact of Global Competitiveness Index (CGI) on Economic Growth in Iran and Some Selected Countries. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 11(12), 53–60.
- Defianti, L., Aimon, H., & Alianis. (2020). PENGARUH INFRASTRUKTUR, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4).
- Doucouliafos, H., & Ulubasoglu, M. (2006). Democracy and Economic Growth : A Meta-Analysis. In *Social Science Research Network (SSRN)*. [https://doi.org/Doucouliafos, Chris \(Hristos\) and Ulubasoglu, Mehmet Ali, Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis. Deakin University School of Accounting, Economics and Finance Working Paper Series No. 2006/04, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1014333 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1014333](https://doi.org/Doucouliafos, Chris (Hristos) and Ulubasoglu, Mehmet Ali, Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis. Deakin University School of Accounting, Economics and Finance Working Paper Series No. 2006/04, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1014333 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1014333)
- Economist Intelligence Unit. (2020). "Democracy Index 2020: In sickness and in health?". *Eiu.com*.
- Elizabeth, A. (2019). *Analisis pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2010-2017. Skripsi*. (Tidak diterbitkan). Institut Pertanian Bogor.
- Fajar, M., & Azhar, Z. (2018). Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara. *EcoGen*, 1(3), 681–688. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/Jmpe.v1i3.5114>
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Gujarati, D. N. (2007). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.

- Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D. (2021). Penguatan Karakter Anti Korupsi Bagi Lurah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 119–126. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.32372>
- Haqiqi, A. H., & Putra, H. A. D. (2020). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi. *REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 154–164. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i2.2325>
- Hasan, M., & Aziz, M. (2018). *1 Pembangunan Ekonomi* (kedua). CV. Nur Lina.
- Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. In *Political Order in Changing Societies*. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1970-2-257>
- International, T. (2006). *Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*.
- John, V. (2017). The Global Competitiveness of Thailand : An Empirical Analysis of The ASEAN Community. *Assumption Univerrrsity-EJournal of Interdisciplinary Rerearch*, 2(2), 41–50.
- Joko, W. (2010). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara. *Buletin Ekonomi*, 8(2), 159–170.
- Kenton, W. (2021, Juli 30). Corruption Perception Index (CPI). *Investopia*. <https://www.investopedia.com/terms/c/corruption-perception-index.asp>
- Kpunde, S.J. (2000). Corruption and corruption in Afrika.
- Kunjana, G. (2015, Februari, 17). Pertumbuhan Thailand terendah dalam 3 tahun. <https://investor.id/archive/pertumbuhan-thailand-terendah-dalam-3-tahun>
- Lidwina, A. (2020, Januari, 24). Demokrasi Indonesia Peringkat 4 di Asia Tenggara. *databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/demokrasi-indonesia-peringkat-4-di-asia-tenggara>
- Machmud, A. 2016. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Salemba Empat.
- Marisha, P. (2020). *Rekam Jejak Indonesia di ASEAN Edisi*. Jakarta. Direktorat Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Maulidia, S. I., & Yulistiyono, H. (2020). Peran Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(2), 149–167. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i2.1924>
- Mulia, H. (2022, Mei 12). Mengapa indikator demokrasi negara-negara asia tenggara menurun ?. *Asumsi Post*. <https://asumsi.co/post/1997/mengapa-indikator-demokrasi-asia-tenggara-turun>
- Munajat, M. A. (2015). Pengaruh Leverage dan Financial Distress terhadap Konservatisme Akuntansi. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 38–52.
- Nababan, T. S. (2019). Development Analysis of Global Competitiveness Index of ASEAN-7 Countries and Its Relationship on Gross Domestic Product. *Integrated Journal of Business and Economics*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i1.108>
- Nastiti, N. N., & Iqbal, F. M. (2018). Strategi Dan Tantangan: Rencana Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Nasional Pemerintah Laos Tahun 2000-2020. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(1), 54. <https://doi.org/10.22303/pir.3.1.2018.54-75>
- Nairobi, N., Santi, N. R., & Afif, F. Y. (2021). The Impact of the Quality of Democracy on the Economic Growth of Provinces in Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 1(2), 121–131. <https://doi.org/10.35912/jgas.v1i2.626>
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 3–22.
- Off Shore Company Corp. (2019). *Peningkatan daya saing vietnam : indeks kompetitiv global 2019*. <https://www.offshorecompanycorp.com/id/id/insight/jurisdiction-update/vietnams-improving-competitiveness-2019-global-competitive-index>
- Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik Bagian 1 : Peran Pemerintah. In *Economic Development and Public Finance Universitas Brawijaya* (1st ed., pp. 1–46). Economic Development and Public Finance Universitas Brawijaya.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *ISSN*, 18(2), 251–264.
- Rajagukguk, W. (2018). Daya Saing (Competitiveness) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara : Studi Kasus Negara Berkembang. *Universitas Kristen Indonesia*, 1–15. <http://repository.uki.ac.id/533/>
- Riza, nadya D. (2020). No Title. In P. K. A. B. K. S. DPR RI (Ed.), *Perkembangan*

Indeks Daya Saing Global Indonesia (Referensi, pp. 1–12). Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI.

- Rositawati, A. F. D., & Budiantara, I. N. (2019). Pemodelan Indeks Kebahagiaan Provinsi di Indonesia Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.45160>
- Sumarsono, D. (2016). Sistem Perekonomian Negara-Negara Di Dunia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v16i02.146>
- Sakti, I. 2018. Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. Jakarta : Universitas Esa Unggul.
- Sari, M. E. P. (2018). Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Trias Politica*, 2(1), 1–12. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1234>
- Setiawan, A. (2016). ASEAN “Political-Security” Community : Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara. *Jurnal KPK*, 2(1), 69–89.
- Sinambela, S. I., & Ardiyanti, D. (2020). PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) PADA GENERASI MUDA. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 156–162. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i2.9636>
- Sirait, I. A. (2018). Demokrasi. <https://repository.uinsu.ac.id>
- Sulistyowati, N. 2011. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah*. Disertasi. (Tidak diterbitkan). Institut Pertanian Bogor.
- Suyastri, C. (2020, Oktober, 20). Memahami kembali makna demokrasi di era yang berubah. <https://www.berazam.com/opini-32-2020-10-06-memahami-kembali-makna-demokrasi-di-era-yang-Berubah.html#sthash.Nge5IbXi.dpbs>
- Sumarni. (2013). "Intervensi Pemerintah" Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi. *Economica*, 1(2), 183–194. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.118>
- Tarigan, P. (2011). Faktor Pendukung Keberhasilan Singapura Sebagai Salah Satu Pusat Perdagangan Dunia (Kajian Perspektif Multinational Corporation di Singapura). *Jurnal Ekonomi*, 13(1), 1–55.
- Thalhah, H. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum*, 16(3), 413–422.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>

Wayan, N., Dewi, N., Kembar, M., & Budhi, S. (2013). *ISSN: 2303-0178 PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL LANGSUNG DI PROVINSI BALI* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia *PENDAHULUAN Pembangunan nasional adalah tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran rakya*. 1391–1420.

World Economic Forum. (2014). *The 12 pillars of competitiveness (PDF)*. <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methology/>

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Edisi Kelima*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.